

KAJIAN

**PENDAHULUAN RENCANA INDUK
DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

Tahun 2024



PRA KATA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen "**Kajian Pendahuluan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2029**" dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam merancang strategi dan arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Penyusunan kajian ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan akademisi, pelaku usaha, masyarakat, maupun pemerintah daerah, agar mampu menjadi panduan strategis yang implementatif dan relevan.

Kajian ini menggaris bawahi pentingnya IPTEK sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kota Pangkal Pinang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan dalam pemanfaatan IPTEK di Kota Pangkal Pinang, menyusun langkah-langkah strategis yang sinergis dengan visi pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang IPTEK serta mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang mendukung daya saing daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan masukan dan penyempurnaan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dokumen ini dapat menjadi referensi yang lebih baik untuk masa depan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Kota Pangkal Pinang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Pangkalpinang, Desember 2024

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan berjudul *"Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Pangkal Pinang"* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pangkal Pinang dan Universitas Bangka Belitung (UBB). Sinergi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi.

Dalam era otonomi daerah, penguatan riset dan inovasi menjadi faktor kunci bagi percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan panduan strategis untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kebijakan pembangunan, serta mendorong perbaikan ekosistem riset dan inovasi di Kota Pangkal Pinang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini, termasuk tim ahli, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis inovasi di Kota Pangkal Pinang.

Pangkal Pinang, Desember 2024

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset Dan Inovasi
Daerah Kota Pangkal Pinang**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LATAR BELAKANG	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI	
DAERAH.....	5
2.1 Gambaran Umum Daerah	5
2.1.1 Aspek Geografis	5
2.1.2 Aspek Kependudukan	9
2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan	10
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	15
2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	15
2.1.4.2 Umur Harapan Hidup	17
2.1.4.3 Rata-rata Lama Sekolah	18
2.1.4.4 Harapan Lama Sekolah	19
2.1.4.5 Pendapatan Perkapita	20
2.1.5 Produk Unggulan Daerah.....	21
2.1.5.1 Produk Olahan Hasil Perikanan	22
2.1.5.2 Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner	29
2.1.5.3 Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk.....	37
2.1.5.4 Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya	40
2.1.5.5 Wisata Budaya Berbasis Potensi Lokal.....	45
2.1.6 Permasalahan Utama Daerah	51
2.2 Gambaran Umum Riset dan Inovasi Daerah.....	56
2.3 Tema Prioritas	62
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH....	66



3.1 Tantangan	67
3.1.1 Keterbatasan Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	68
3.1.2 Keterbatasan Sumber Daya Finansial.....	69
3.1.3 Infrastruktur Teknologi yang Terbatas.....	70
3.1.4 Kesadaran dan Budaya Inovasi yang Rendah.....	71
3.1.5 Kurangnya Kolaborasi dan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan	71
3.2 Peluang.....	72
3.2.1 Sumber Daya Manusia.....	73
3.2.2 Kerjasama Kemitraan dalam Menghasilkan Pendanaan Alternatif	74
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH	76
4.1 Kebijakan dan Infrastuktur Riset dan Inovasi di Daerah	77
4.2 Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	78
4.3 Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	79
4.4 Budaya Riset dan Inovasi di Daearah.....	80
4.5 Keterpaduan Riset dan Inovasi di Dareah.....	81
4.6 Penyelarasan dengan Perkembangan Global	83
BAB V STRATEGI DAN INOVASI DAERAH	84
5.1 Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah.....	84
5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	86
5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	87
5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah.....	88
5.5 Strategi Peningkatan Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah.....	89
5.6 Strategi Penyelarasan dengan Perkembangan Global	90
5.7 Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	91



DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Pangkal Pinang	6
Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partipisasi Angkatan Kerja Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022	11
Gambar 2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022	17
Gambar 2.4 Umur Harapan Hidup Kota Pangkal Pinang	18
Gambar 2.5 Rata-rata Lama Sekolah Kota Pangkal Pinang Tahun 2018- 2022	19
Gambar 2.6 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022	20
Gambar 2.7 Pengeluaran Perkapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2018- 2022	21
Gambar 2.8 Produk Hasil Olahan Ikan (Kretek/Getas) di Kota Pangkal Pinang	25
Gambar 2.9 Produk Hasil Olahan Ikan (Kemplang) di Kota Pangkal Pinang	26
Gambar 2.10 Produk Hasil Olahan Ikan (Kerupuk) di Kota Pangkal Pinang	27
Gambar 2.11 Produk Hasil Olahan Ikan (Kricu) di Kota Pangkal Pinang.	28
Gambar 2.12 Kuliner Otak-otak Khas Kota Pangkal Pinang	34
Gambar 2.13 Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner (Otak-otak) di Kota Pangkal Pinang	36
Gambar 2.14 Produk Timah	38
Gambar 2.15 Pengembangan Desa Wisata Sejagad	41
Gambar 2.16 Jumlah Produksi Kepiting Bakau (Kg) di Kota Pangkal Pinang	44
Gambar 2.17 Jumlah Pengunjung Pantai Pasir Padi Tahun 2021-2023..	48
Gambar 2.18 Pendapatan Pantai Pasir Padi	49
Gambar 2.19 Wisata Budaya	50
Gambar 2.20 <i>Cascading</i> Riset dan Inovasi Kota Pangkal Pinang	58



Gambar 4.1 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Infrastuktur Riset dan Inovasi di Daerah	78
Gambar 4.2 Analisis Kesenjangan dan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	79
Gambar 4.3 Analisis Kemitraan Riset dan Inovasi Kota Pangkal Pinang	80
Gambar 4.4 Analisis Budaya Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang	81
Gambar 4.5 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang	82
Gambar 4.6 Analisis Kesenjangan Penyelarasan dengan Perkembangan Global Kota Pangkal Pinang	83



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah, dan Kelurahan Di Kota Pangkal Pinang	7
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022	9
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022	10
Tabel 2.4 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022	12
Tabel 2.5 Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2022	13
Tabel 2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022	15
Tabel 2.7 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD Produk Olahan Hasil Perikanan.....	23
Tabel 2.8 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner	30
Tabel 2.9 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk	38
Tabel 2.10 Pemetaan Kondisi Eksosistem Riset dan Inovasi PUD Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya	42
Tabel 2.12 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD Wisata Budaya Berbasis Potensi Lokal	46
Tabel 2.13 Jumlah Personalia Menurut Jabatan Di BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang	59
Tabel 2.14 Capaian Kinerja BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang Tahun 2023	60
Tabel 5.1 Strategi Kebijakan dan Infrastruktur IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang	85



Tabel 5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang	86
Tabel 5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang	88
Tabel 5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang	89
Tabel 5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah.....	90
Tabel 5.6 Strategi Penyelarasan dengan Perkembangan Global	90
Tabel 5.7 Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	91

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi barang dan jasa serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor-sektor ekonomi tertentu. Dalam upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi maka perlu adanya distribusi sumber daya yang lebih merata dan penciptaan kelembagaan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui peran pemerintah.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang penting sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang diberikan oleh konstitusi, didukung oleh perangkat daerah. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang efektif dan pengelolaan anggaran yang efisien, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pemerintah daerah bertugas mengatur urusan pemerintahan dengan adanya prinsip otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, serta menjalin hubungan dengan pemerintahan pusat.

Perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memperkuat hubungan langsung pemerintah daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di daerah harus direncanakan, diimplementasikan, serta dievaluasi dengan cermat untuk memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah terletak pada perencanaan yang didasarkan pada



pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan inovasi. Perencanaan ini memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan terarah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor determinan seperti pengentasan kemiskinan melalui berbagai langkah, termasuk penyediaan lapangan kerja, pendidikan vokasi, dan lainnya.

Pentingnya riset dan inovasi dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan semakin ditekankan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), yang menempatkan IPTEK sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Implementasi dari Undang-Undang ini diperkuat melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021, yang mengatur tata kelola riset dan inovasi di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah diwajibkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Salah satu tugas utama BRIDA adalah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah (Renduk) untuk mendukung pembangunan berbasis riset dan inovasi. Dalam mendukung amanat tersebut, terbentuklah Badan Perencanaan dan Pengembangan Riset Daerah (BAPPERIDA) di Kota Pangkalpinang, yang didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua PERDA Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. BAPPERIDA Kota Pangkalpinang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah sekaligus mendukung pengembangan riset dan inovasi.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BRIN, diharapkan fungsi riset dan inovasi dapat semakin berkembang, sehingga memperkuat kebijakan pembangunan berbasis pengembangan IPTEK dan inovasi. Hal ini tidak hanya mendukung percepatan pembangunan ekonomi



di daerah, tetapi juga menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah
- h. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2023.
- j. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025.
- k. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.



1. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2029 ini adalah memberikan arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kemudian tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Pangkal Pinang;
- b. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan riset dan inovasi Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2029 .
- c. Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2029.
- d. Merumuskan strategi pelaksanaan riset dan inovasi Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2029.
- e. Memberikan rancangan sasaran strategi dan fokus kebijakan berdasarkan bukti (*evidence based- policy*) sebagai bahan landasan penyusunan RPJMD periode berikutnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH



2.1. Gambaran Umum Daerah

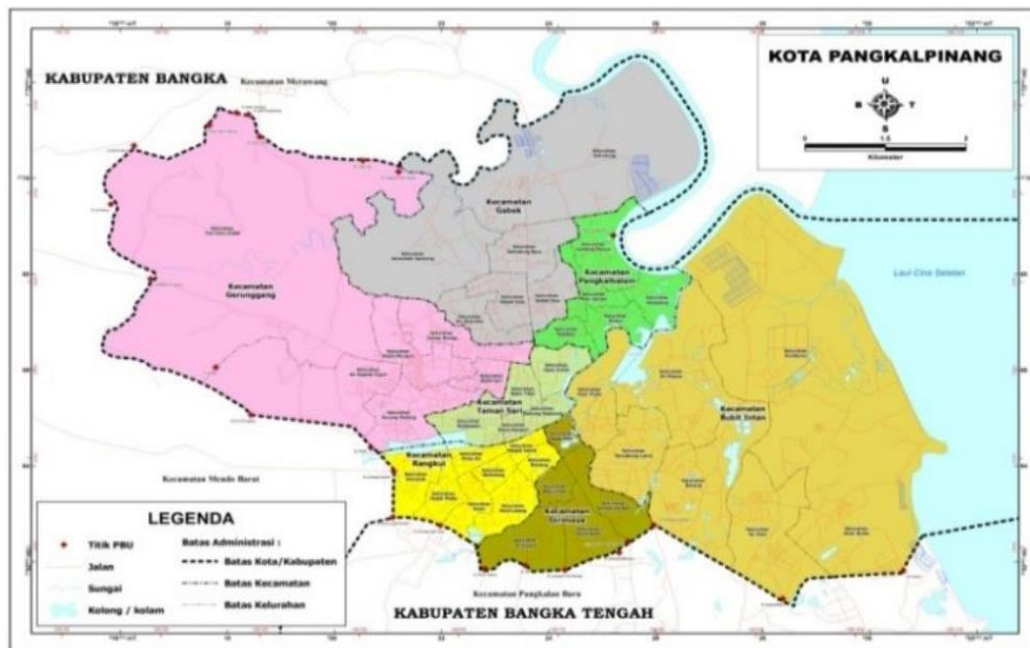
Gambaran Kota Pangkal Pinang mulai dari aspek geografis, kependudukan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan sebagai berikut:



2.1.1. Aspek Geografis

Kota Pangkal Pinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kota strategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Bangka serta menjadi koridor dan nodes pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang memiliki luas wilayah 104,541 km² dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah hanya sebesar 0,72%. Secara astronomis, Kota Pangkal Pinang terletak antara 02 03'-02 10' Lintang Selatan dan 106 02'-106 12' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Pangkal Pinang

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2011

Kondisi topografi Kota Pangkal Pinang dilihat berdasarkan ketinggian dan kemiringan lahan. Secara topografis, Kota Pangkal Pinang memiliki bentang alam dataran dengan kondisi berbukit dan memiliki kontur yang pada umumnya bergelombang dengan ketinggian antara 20-50 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-25%. Daerah berbukit berada di bagian barat dan selatan Kota Pangkal Pinang, diantaranya Bukit Girimaya dan Bukit Menara.

Dari kategori lereng, Kota Pangkal Pinang terbagi menjadi 6 (enam) kelas lereng, yaitu:

- Kelas lereng 0-2% (topografi sangat datar hingga cekungan) meliputi wilayah Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 2-8% (topografi datar), lokasi ini meliputi pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 8-15% (topografi landai agak miring), meliputi kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil dan dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam,



Kecamatan Rangkui, Kecamatan Taman Sari serta Kecamatan Gerunggang;

- Kelas lereng 15-25% (topografi agak curam), terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 25-40 % (topografi curam), terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng >40 % (topografi sangat curam), terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

Kota Pangkal Pinang memiliki iklim tropis kering, dengan kelembaban udara berkisar antara 61%-96% dan temperatur udara berkisar antara 23,40° C-32,10° C. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 254 hari. Temperatur udara rata-rata wilayah Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2022 adalah sekitar 26,7° C. Kelembapan udara rata-rata sebesar 86,2. Lama penyinaran matahari pada Tahun 2022 sebesar 43,8%. Tekanan udara rata-rata yaitu 1009 milibar. Rata-rata kecepatan angin pada Tahun 2022 yaitu 3,9 m/s.

Secara administrasi, Kota Pangkal Pinang terbagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 42 kelurahan. Luas wilayah, persentase luas wilayah dan kelurahan Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah, dan Kelurahan di Kota Pangkal Pinang

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase		Nama Kelurahan
			Luas Wilayah (Persen)	Jumlah Kelurahan	
1	Rangkui	5.011	4,79	8	Parit Lalang, Keramat, Bintang, Asam, Masjid Jamik, Gajah Mada, Melintang dan Pintu Air
2	Bukit Intan	35.680	34,13	7	Sinar Bulan, Temberan, Air Itam, Air Mawar, Bacang, Pasir Putih dan Semabung Lama



No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (Persen)	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan
3	Girimaya	4.347	4,16	5	Sriwijaya, Pasar Padi, Batu Intan, Bukit Besar dan Semabung Baru
4	Pangkalbalam	4.742	4,54	5	Pasir Garam, Rejosari, Lontong Pancur, Ampui dan Ketapang
5	Gabek	20.455	19,57	6	Gabek Satu, Gabek Dua, Jerambah Gantung, Selindung, Selindung Baru dan Air Salemba
6	Taman Sari	3.215	3,08	5	Gedung Nasional, Opas Indah, Batin Tikal, Rawa Bangun dan Kejaksanaan
7	Gerunggang	31.091	29,74	6	Kacang Pedang, Bukit Merapin, Bukit Sari, Air Kepala Tujuh, Tua Tunu Indah dan Taman Bunga
Jumlah		104.541	100,00%	42	

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2024
Permendagri Nomor 114 Tahun 2019
Perda Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 2.1, diketahui bahwa Kota Pangkal Pinang memiliki 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Rangkui dengan luas wilayah 5.011 km², Kecamatan Bukit Intan dengan wilayah 35.680 km², Kecamatan Girimaya dengan luas wilayah 4.347 km², Kecamatan Pangkalbalam dengan luas wilayah 4.742 km², Kecamatan Gabek dengan luas wilayah 20.455 km², Kecamatan Taman Sari dengan luas wilayah 3.215 km² dan Kecamatan Gerunggang dengan luas wilayah 31.091 km².

Kecamatan Taman Sari merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu sebesar 3,08% dari luas wilayah keseluruhan, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gerunggang sebesar 29,74% dari total wilayah kota. Memiliki 42 kelurahan, Kota Pangkal Pinang juga terdiri dari 355 RT dan 114 RW.



2.1.2. Aspek Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang adalah 226.297 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 111.609 jiwa (49,32%) dan penduduk perempuan sebanyak 114.688 jiwa (50,68%). Laju pertumbuhan 2020-2022 sebesar 2,0%. Rasio jenis kelamin di Kota Pangkal Pinang sebesar 102,76. Sebaran jumlah penduduk per kecamatan di Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rangkui	40.102	38.724	35.703	36.261	36.965
Bukit Intan	38.211	38.318	41.343	41.990	42.805
Girimaya	21.141	19.237	18.129	18.413	18.770
Pangkalbalam	22.684	22.567	22.142	22.488	22.925
Gabek	26.284	31.482	35.013	35.561	36.251
Taman Sari	23.555	21.283	18.473	18.762	19.126
Gerunggung	36.543	43.768	47.766	48.513	49.455
Pangkal Pinang	208.520	215.379	218.569	221.988	226.297

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Berdasarkan Tabel 2.2, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah dari Tahun 2018-2022 adalah Kecamatan Girimaya, jumlah penduduk tertinggi Tahun 2019 hingga 2022 adalah Kecamatan Gerunggung. Sedangkan pada Tahun 2018 jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Rangkui. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan sebanyak 4.381 jiwa per tahun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 2,06% per tahun.

Jika dilihat dari sebaran penduduk menurut kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 terus mengalami peningkatan yang pada Tahun 2022 mencapai 156.456 jiwa atau sebesar 69,50% dan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan >64 tahun) adalah sebanyak 69.841 jiwa atau sebesar



30,86%. Secara lebih rinci, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

Struktur Umur (Tahun)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	19.474	19.868	19.934	20.294	20.709
5-9	17.951	18.312	17.519	17.427	17.531
10-14	17.001	17.344	18.216	18.044	17.867
15-19	18.566	18.941	17.172	17.269	17.427
20-24	20.115	20.520	17.917	18.055	18.258
25-29	20.100	20.506	19.311	19.336	19.484
30-34	18.683	19.060	19.456	19.528	19.605
35-39	16.512	16.845	18.181	18.463	18.827
40-44	14.857	15.157	16.268	16.567	16.900
45-49	12.358	12.608	13.722	14.121	14.560
50-54	10.910	11.129	11.424	11.872	12.387
55-59	8.686	8.861	9.513	9.872	10.270
60-64	5.390	5.499	7.975	8.355	8.738
65-69	3.216	3.281	5.840	6.185	6.542
70-74	2.127	2.170	3.239	-	3.842
75+	2.574	2.626	2.882	-	3.350

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Secara rata-rata dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, jumlah penduduk produkti Kota Pangkal Pinang adalah sebanyak 151.227 jiwa atau sebesar 69,50%. Artinya, Kota Pangkal Pinang dari Tahun 2018-2022 di dominasi oleh penduduk produktif atau penduduk usia kerja.

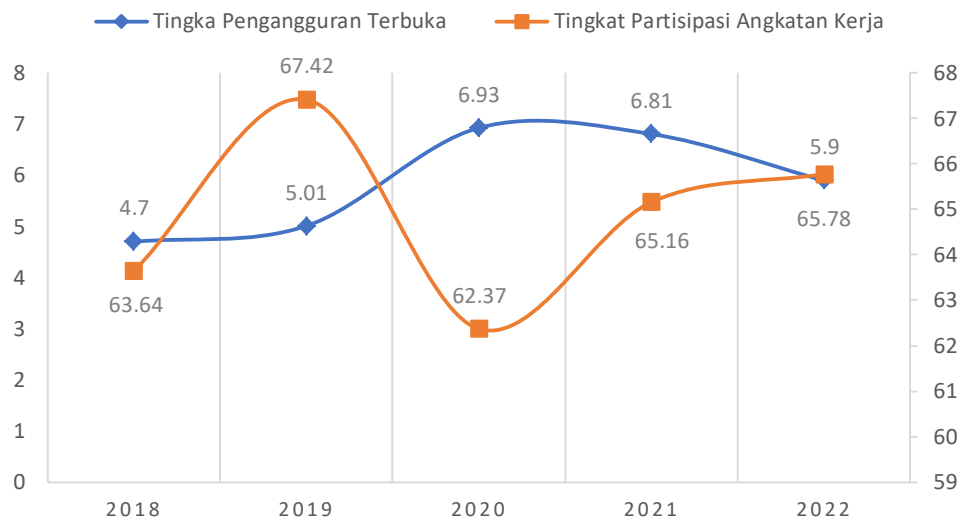


2.1.3. Aspek Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan komponen krusial dalam struktur sosio-ekonomi suatu masyarakat dan berfungsi sebagai penanda kunci dari kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. Aksesibilitas terhadap peluang kerja yang signifikan, kondisi kerja yang layak, serta peningkatan keterampilan relevan, diakui sebagai elemen penting untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan pengurangan tingkat kemiskinan. Angka pengangguran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Perkembangan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka



(TPT) Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Secara keseluruhan, perubahan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkal Pinang mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pasar kerja di Kota Pangkal Pinang. TPT Kota Pangkal Pinang dari Tahun 2018-2022 memiliki tren fluktuatif cenderung meningkat. Tahun 2018 TPT sebesar 4,70% dan merupakan TPT terkecil lalu meningkat hingga Tahun 2021 dan menurun pada Tahun 2022. Peningkatan TPT dari Tahun 2020 hingga 2021 adanya dampak masuknya virus Covid-19 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan banyak pelaku ekonomi mengalami kesulitan dalam mengoperasikan usaha/perusahaannya. Namun, di Tahun 2022 TPT mulai menurun karena semakin membaiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkal Pinang.

Berdasarkan Gambar 2.2, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkal Pinang Tahun 2018 hingga Tahun 2022 mengalami fluktuatif. Dimana mengalami peningkatan pada Tahun 2019 sebesar 3,78 poin dan merupakan TPAK tertinggi, lalu menurun di Tahun 2020 sebesar 5,05 poin, hal tersebut disebabkan masuknya virus Covid-19 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di Kota Pangkal



Pinang. Namun, di tahun selanjutnya yakni 2021 hingga 2022, TPAK Kota Pangkal Pinang terus mengalami perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya TPAK hingga mencapai 65,78 pada Tahun 2022.

Data demografi sangat penting digunakan untuk membentuk dan memahami profil ketenagakerjaan di suatu wilayah. Berikut data distribusi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin dan total penduduk Kota Pangkal Pinang.

Tabel 2.4 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

Indikator	2018			2019			2020			2021			2022		
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
Angkatan Kerja	63.996	36.204	100.200	68.952	41.165	110.117	63.973	36.939	100.912	66.838	40.277	107.115	67.862	41.899	109.761
Bekerja	60.821	34.670	95.491	64.597	40.004	104.601	58.862	35.053	93.915	62.223	37.596	99.819	62.614	40.668	103.282
Pengangguran Terbuka	3.175	1.534	4.709	4.355	1.161	5.516	5.111	1.886	6.997	4.615	2.681	7.296	5.248	1.231	6.479
Bukan Angkatan Kerja	16.771	40.477	57.248	13.788	37.209	50.997	18.137	42.744	60.881	16.430	40.842	57.272	16.531	40.560	57.091
Sekolah	6.038	7.480	13.518	5.465	6.202	11.667	4.937	5.957	10.894	5.349	5.051	10.400	6.829	7.225	14.054
Mengurus Rumah Tangga	6.693	30.350	37.043	3.144	28.274	31.418	5.851	33.435	39.286	6.670	33.195	39.865	5.279	31.933	37.212
Lainnya	4.040	2647	6.687	5.179	2.733	7.912	7.349	3.352	10.701	83.268	-	83.268	4.423	1.402	5.826
Total	80.767	76.681	157.448	82.740	78.374	161.114	82.110	79.683	161.793	83.268	81.119	164.387	84.393	82.459	166.852

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Tabel 2.4 menggambarkan tentang aktivitas penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam konteks ekonomi di Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2022, dari total penduduk 226.297 jiwa, 109.761 orang termasuk ke dalam kategori angkatan kerja dengan penduduk laki-laki yang mendominasi yaitu sebanyak 67.862 orang dan perempuan sebanyak 41.899 orang. Dalam kategori ini, mayoritas adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah 103.282 orang, sementara pengangguran terbuka mencapai 6.479 orang. Sementara itu, untuk kategori bukan angkatan kerja, jumlahnya mencapai 57.091 orang, dengan jumlah perempuan sebanyak 40.560 orang yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki sebanyak 16.531 orang. Kategori ini terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 14.054 orang, mengurus rumah tangga sebanyak 37.212 orang, dan lainnya sebanyak 5.826 orang. Perempuan mendominasi dalam subkategori sekolah dan mengurus rumah tangga masing-masing dengan



jumlah mencapai 7.225 dan 31.933 orang. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah angkatan kerja per tahun dari Tahun 2018-2022 adalah sebanyak 105.621 orang dengan rata-rata jumlah laki-laki sebanyak 66.324 orang dan perempuan 39.297 orang. Sedangkan pada kategori bukan angkatan kerja, rata-rata per tahun adalah sebanyak 56.698 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 16.331 orang dan perempuan sebanyak 40.366 orang.

Gambaran mengenai tingkat pendidikan penduduk usia kerja di Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2022 yang menampilkan rincian penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai, baik bagi laki-laki maupun perempuan seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Jumlah Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Total
≤ Sekolah Dasar	18.721	1.402	20.123	16.195	36.318
Sekolah Menengah Pertama	14.240	1.856	16.096	17.132	33.228
Sekolah Menengah Atas	41.738	2.669	44.407	21.775	66.182
Perguruan Tinggi	28.583	552	29.135	1.989	31.124
Jumlah/Total	103.282	6.479	109.761	57.091	166.852

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Berdasarkan Tabel 2.5, dari 109.761 orang jumlah angkatan kerja, sebanyak 103.282 orang atau sebesar 94,10% adalah bekerja sedangkan sebanyak 6.479 orang atau 5,90% pengangguran. Kategori pengangguran didominasi oleh penduduk dengan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 2.669 orang dan yang terendah adalah tamatan perguruan tinggi yaitu sebanyak 552 orang.

Tabel 2.6 memperlihatkan jumlah dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Pangkal Pinang, dibagi berdasarkan lapangan usaha pekerjaan utama mereka. Dengan data tersebut dapat memahami bagaimana distribusi pekerjaan dalam ekonomi lokal dan sejauh mana sektor tertentu mendominasi pasar kerja.



Tabel 2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022

Status Pekerjaan Utama	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	Jumlah
Berusaha sendiri	1.702	4.232	16.396	22.330
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	273	784	2.234	3.291
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	728	2.843	2.231	5.802
Buruh/Karyawan/Pegawai	604	9.468	56.178	66.250
Pekerja bebas	200	1.502	632	2.334
Pekerja keluarga/tak dibayar	0	341	2.934	3.275
Jumlah	3.507	19.170	80.605	103.282

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Tabel 2.6 menggambarkan distribusi pekerja di Kota Pangkal Pinang yang berumur 15 tahun ke atas, berdasarkan status pekerjaan dan lapangan pekerjaan utama. Pekerja yang berstatus "Berusaha Sendiri" merupakan kelompok terbesar kedua dalam sampel ini, dengan jumlah total 22.330 orang. Distribusi pekerja terbesar berada dalam sektor industri pengolahan dan jasa, masing-masing sebanyak 4.232 dan 16.396 pekerja. Serapan pekerja mandiri pada sektor pertanian dengan total 1.702 pekerja.

Pekerja yang berstatus "Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar" tercatat sebanyak 3.291 orang. Mayoritas pekerja berada di sektor jasa, yaitu sejumlah 2.234 pekerja. Sementara itu, sektor pertanian menampung jumlah pekerja paling sedikit dalam kategori ini, yaitu sebanyak 273 pekerja. Pada penduduk dengan status "Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar", ada total 5.802 pekerja. Sektor industri pengolahan menyerap jumlah pekerja terbanyak dengan total 2.843 pekerja sedangkan sektor pertanian mencatatkan jumlah pekerja paling sedikit dalam kategori ini, yaitu 728 pekerja. Status "Buruh/Karyawan/Pegawai" mencakup jumlah pekerja terbesar dari semua kategori, dengan total 66.250 pekerja. Sektor jasa adalah lapangan kerja utama bagi pekerja dalam kategori ini, dengan total 56.178 pekerja, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan pertanian, dengan total masing-masing 9.468 dan 604 pekerja.

Pekerja yang berstatus "Pekerja Bebas" tercatat sebanyak 2.334 pekerja, dengan sektor industri pengolahan dan jasa sebagai sektor dominan yang menyerap pekerja dalam kategori ini. Dan sektor pertanian masih menjadi kategori dengan daya serap paling sedikit sedikit yaitu 200 pekerja. Pekerja yang berstatus "Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar" mencakup total 3.275 pekerja. Sektor jasa masih menjadi lapangan kerja utama bagi pekerja dalam kategori ini, dengan total 2.934 pekerja dan sektor pertanian tidak ada daya serap sama sekali atau sama dengan 0. Berdasarkan data yang tampilkan, sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Pangkal Pinang, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan pertanian. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar pekerja di Kota Pangkalpinang memiliki status sebagai "Buruh/Karyawan/Pegawai" dan "Berusaha Sendiri".



2.1.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita yang diidamkan oleh setiap negara untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Konsep kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kesejahteraan masyarakat antara lain yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita.

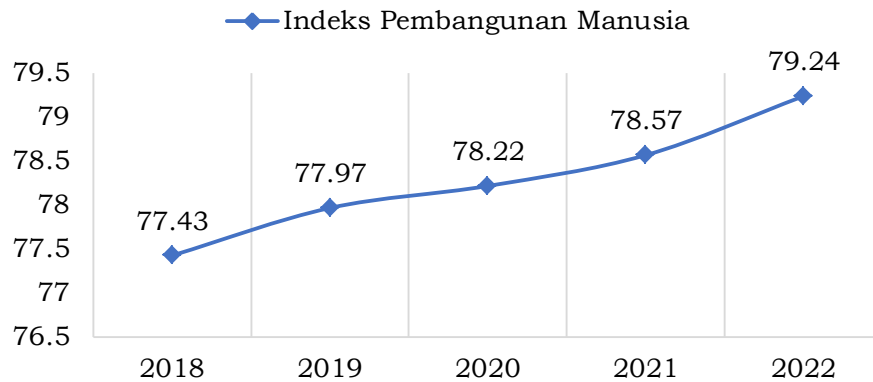


2.1.4.1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan ukuran kualitas hidup terkait capaian pembangunan manusia yang berbasis tiga dimensi dasar yaitu: 1) Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); 2) Dimensi pengetahuan (*knowledge*); dan 3) Dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam memperoleh standar kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang layak untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menunjukkan lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara itu, untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator pengeluaran perkapita yang merupakan gambaran dari pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir IPM Kota Pangkal Pinang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Periode 2018-2022, terjadi peningkatan sebesar 1,81 poin dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,476 poin. Peningkatan ini menggambarkan kondisi positif bahwa upaya serius pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan pendapatan menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, dimana perkembangannya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

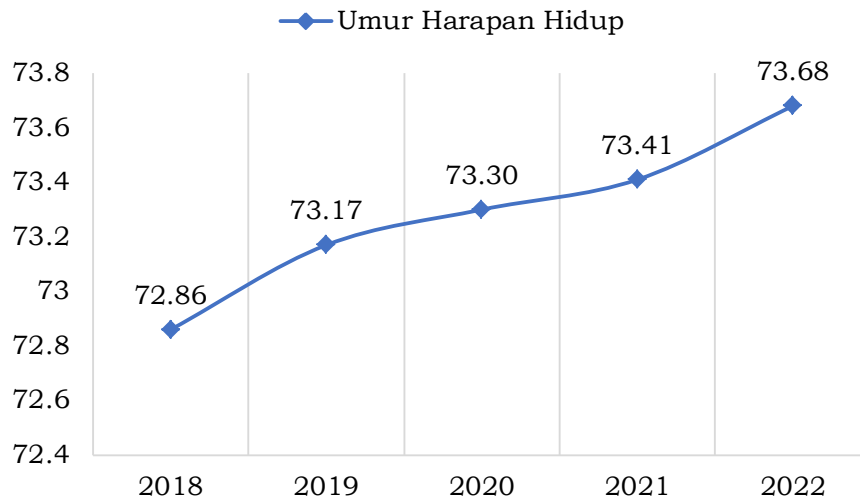
Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Peningkatan IPM seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 merupakan kondisi yang cukup positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian IPM Kota Pangkal Pinang diatas capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Capaian IPM Kota Pangkal Pinang termasuk ke dalam golongan IPM tinggi ($IPM > 70$) berada diatas IPM provinsi dan nasional. Meskipun begitu, tetap diperlukannya usaha peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yang lebih berkualitas.



2.1.4.2. Umur Harapan Hidup

UHH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. UHH menggunakan angka UHH saat lahir merupakan UHH rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Berikut data UHH Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022.



Gambar 2.4 Umur Harapan Hidup Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Berdasarkan Gambar 2.4, UHH penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan yang berarti derajat kesehatan penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini dapat didorong oleh meningkatnya pelayanan kesehatan yang tersedia, meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya taraf pendidikan dan sebagainya. Faktor-faktor ini dapat dihubungkan dengan data pada bidang kesehatan juga ekonomi sosial. Sementara itu, rata-rata UHH saat lahir penduduk Kota Pangkal Pinang selama lima tahun mencapai 73,284 tahun. UHH Kota Pangkal Pinang berada diatas UHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional, meskipun begitu tetap harus adanya peningkatan untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

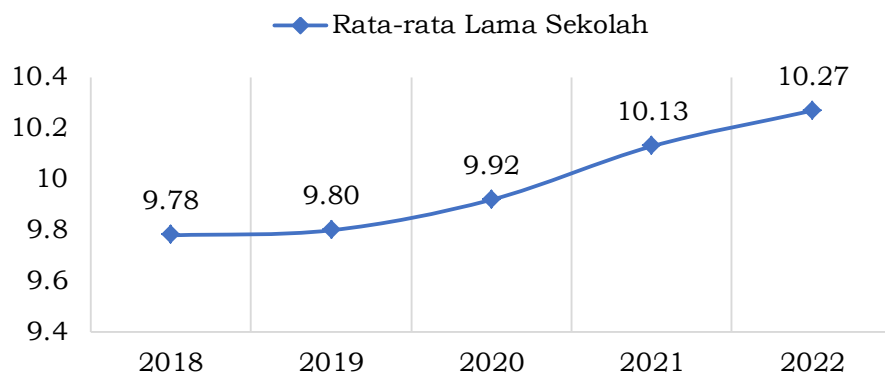


2.1.4.3. Rata-rata Lama Sekolah

Angka RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal untuk cakupan usia 25 tahun ke atas. RLS menggambarkan jenjang pendidikan yang dicapai penduduk dari Sekolah Dasar (SD) sampai kelas terakhir dengan tidak mempertimbangkan



angka putus sekolah dan melanjutkan kembali, tidak naik kelas, dan masuk SD di usia terlalu muda ataupun terlambat. RLS Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 terlihat pada Gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.5 Rata-rata Lama Sekolah Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

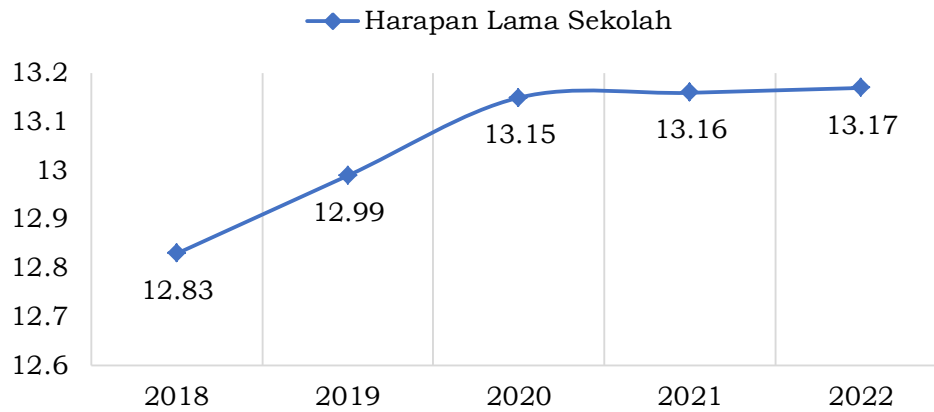
Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Berdasarkan Tabel 2.5, RLS penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata penduduk Kota Pangkal Pinang dengan usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,98 tahun atau menamatkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam kurun waktu 2018-2022. Capaian RLS Kota Pangkal Pinang masih berada diatas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Namun, harus tetap meningkatkan upaya wajib belajar 12 tahun dari pemerintah.



2.1.4.4. Harapan Lama Sekolah

Angka HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS merupakan perhitungan penduduk berusia 7 tahun ke atas yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan angka HLS penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 seperti pada gambar berikut.



**Gambar 2.6 Angka Harapan Lama Sekolah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022**

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Berdasarkan Gambar 2.6, rata-rata angka HLS penduduk Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 adalah 13,06 tahun, yang artinya penduduk diharapkan menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang perguruan tinggi yaitu tahun pertama. Angka HLS penduduk Tahun 2018-2022 sudah mencapai 12 tahun sehingga upaya untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun, dan usaha untuk mencapai tamatan jenjang pendidikan perguruan tinggi perlu dilakukan upaya lebih lagi. Capaian angka HLS ini sudah berada diatas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 dan menyamai capaian nasional.



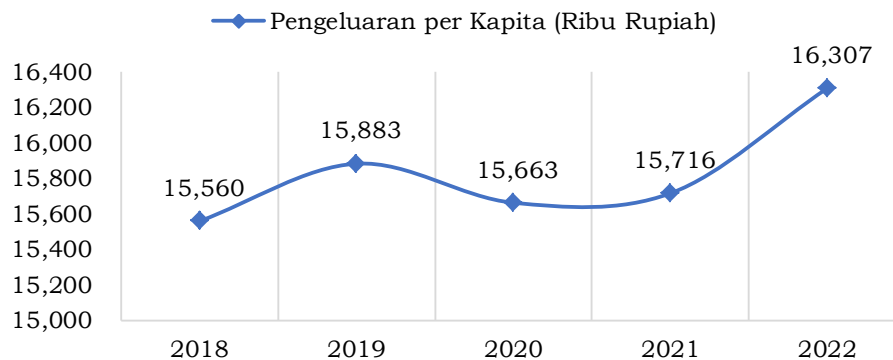
2.1.4.5. Pendapatan per Kapita

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama periode tertentu, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran yang dimaksud merupakan pengeluaran untuk rumah tangga/anggota rumah tangga saja yang dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga, tidak termasuk pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga, atau yang diberikan kepada orang lain.

Pengeluaran per kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 berfluktuasi dengan pengeluaran tertinggi terjadi pada Tahun 2022, dan



pengeluaran terendah Tahun 2018. Pengeluaran per kapita menurun di Tahun 2020, di tahun tersebut terjadinya dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat banyak makanan maupun non makanan. Sedangkan secara rata-rata selama lima tahun yaitu Tahun 2018-2022 pengeluaran per kapita sebesar Rp15.826 (ribu rupiah)/orang/tahun. Pengeluaran perkapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.7 Pengeluaran per Kapita Kota Pangkal Pinang Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023

Berdasarkan Gambar 2.7, pengeluaran per kapita Kota Pangkal Pinang yang memiliki tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Tingkat peningkatan pengeluaran per kapita Kota Pangkal Pinang sebesar Rp277 (ribu rupiah)/orang/tahun.



2.1.5. Produk Unggulan Daerah

Produk unggulan merupakan konsep dalam ekonomi pembangunan yang menekankan pada identifikasi dan pengembangan produk-produk tertentu yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Teori produk unggulan didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua sektor ekonomi dapat berkembang secara bersamaan dengan laju yang sama, sehingga penting untuk memfokuskan sumber daya pada produk atau sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Produk unggulan daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang



maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global (Permendagri No 9 Tahun 2014).

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan produk unggulan daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan potensi unggulan ekonomi daerah untuk ditetapkan menjadi produk unggulan daerah. Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada.



2.1.5.1. Produk Olahan Hasil Perikanan

Kota Pangkal Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dikenal dengan kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah. Keberadaan laut yang luas dan perairan yang kaya akan ikan membuat sektor perikanan menjadi salah satu pilar utama perekonomian kota ini. Selain itu, pengembangan produk olahan hasil perikanan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan produk olahan hasil perikanan, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan ketergantungan pada produk perikanan mentah. Terdapat banyak jenis olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh Kota Pangkal Pinang, namun terdapat beberapa komoditas unggulan daerah yaitu Kretek, Kempelang, Kerupuk, Kricu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal tetapi juga oleh wisatawan yang berkunjung. Diharapkan melalui produk-produk olahan ini mampu meningkatkan daya saing Kota Pangkal Pinang di pasar nasional maupun internasional. Sampai



dengan saat ini Kota Pangkal Pinang terus berupaya untuk menjadi pusat pengolahan hasil perikanan yang unggul dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberi manfaat ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya lautnya.

**Tabel 2.7 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD
Produk Olahan Hasil Perikanan**

No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Produk Olahan Ikan Reformasi				
Produk Olahan Ikan				
1.	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi	Sudah tersedia Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Penataan berbasis data riset dan inovasi	Sudah dilakukan penataan berbasis data riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
C	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sudah tersedia pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
D	Pengelolaan destinasi wisata inovasi	Sudah tersedia pengelolaan destinasi wisata inovasi	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
E	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Sudah tersedia anggaran riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
F	Reformasi kebijakan riset dan inovasi	Sudah dilakukan peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Sudah dilakukan penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sudah dilakukan proses penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Sudah dilakukan penguatan kemitraan antar kelembagaan	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	

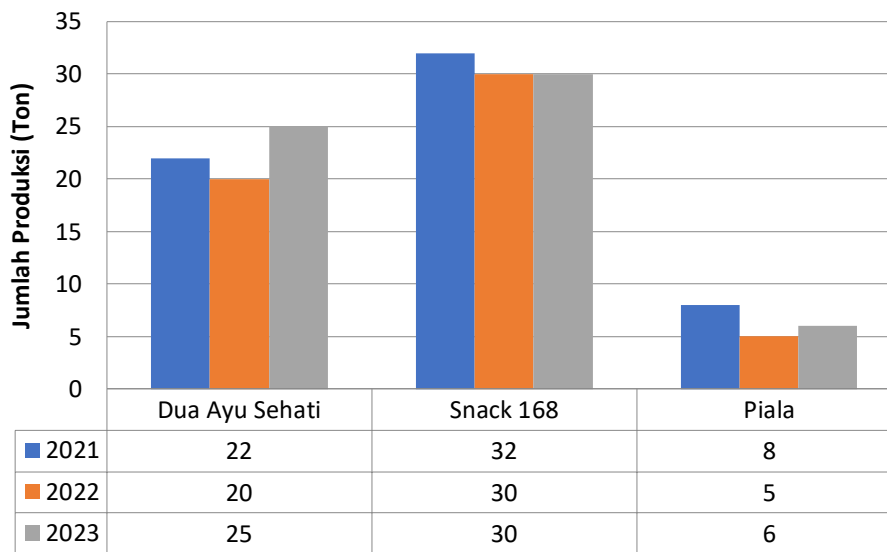


No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Produk Olahan Ikan				
B	Peningkatan persebaran inovasi daerah	Sudah dilakukan peningkatan persebaran inovasi daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
C	Mengimplementasikan hasil riset dan inovasi di daerah	Sudah mengimplementasikan hasil riset dan inovasi di daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
4.	Budaya Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Promosi dan kampanye riset dan inovasi daerah	Sudah melakukan kampanye riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	Sudah melakukan apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
C	Pengembangan mitra usaha berbasis riset	Sudah melakukan pengembangan mitra usaha berbasis riset	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
D	Investarisasi, pengemabangan dan perlindungan IPTEK masyarakat	Sudah melakukan investarisasi, pembangunan, dan perlindungan IPTEK masyarakat	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah	Sudah melakukan inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Sudah melakukan Pengembangan Klaster Inovasi berbasis PUD	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
C	Keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sudah melakukan keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
6.	Penyelarasan Dengan Perkembangan Global			
A	Peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah	Belum di lakukan peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Penguatan kerjasama internasional	Sebagian produk sudah melakukan penguatan kerjasama internasional	Bapperida, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	

Sumber: Data diolah, 2024



Berikut merupakan data produk olahan ikan tiga besar di Kota Pangkal Pinang:



**Gambar 2.8 Produk Hasil Olahan Ikan (Kretek/Getas)
di Kota Pangkal Pinang**

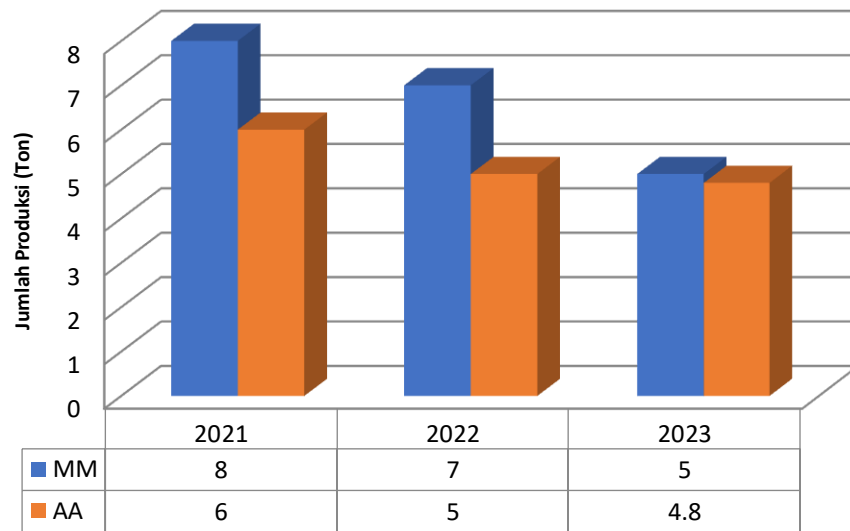
Sumber: Hasil Survei, 2024

Berdasarkan Gambar 2.8 jumlah produksi kretek/getas yang merupakan kelompok tiga besar di Kota Pangkal Pinang menunjukkan dinamika yang bervariasi. Toko Dua Ayu Sehati mengalami fluktuasi produksi, dengan sedikit penurunan pada Tahun 2022 namun kembali meningkat pada Tahun 2023. Toko ini mencatatkan produksi tertinggi pada Tahun 2023 sejumlah 25 ton. Sementara itu, Toko Snack 168 menunjukkan angka produksi yang relatif stabil. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2022, produksi toko ini tetap berada pada level yang cukup tinggi di 30 ton pada 2023, yang mencerminkan keberlanjutan dalam kapasitas produksinya. Di sisi lain, Toko Piala mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam produksinya pada Tahun 2022, namun ada sedikit pemulihan pada Tahun 2023 meskipun tetap berada pada angka yang lebih rendah dibandingkan toko lainnya. Toko ini mencatatkan produksi terendah, yakni hanya 6 ton pada Tahun 2023.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan di beberapa toko, Toko Dua Ayu Sehati dan Toko Snack 168 tetap menunjukkan produksi yang cukup baik, dengan Toko Dua Ayu Sehati mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan pada Tahun 2023. Toko Piala perlu



memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produksinya agar dapat mempertahankan daya saing di pasar.

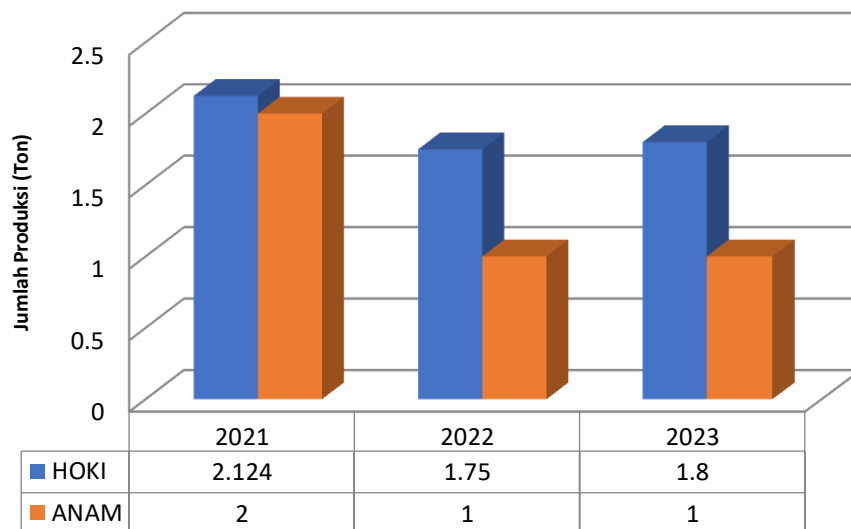


**Gambar 2.9 Produk Hasil Olahan Ikan (Kemplang)
di Kota Pangkal Pinang**

Sumber: Hasil Survei, 2024

Berdasarkan Gambar 2.9, produksi kemplang di Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren penurunan pada kedua toko yang tercatat. Toko MM mengalami penurunan produksi secara bertahap, dimulai dari 8 ton pada 2021 dan berkurang menjadi 5 ton pada 2023. Penurunan yang serupa juga terlihat pada Toko AA, yang produksinya turun dari 6 ton pada 2021 menjadi 4,8 ton pada 2023.

Secara keseluruhan, kedua toko mengalami penurunan produksi yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan permintaan pasar, perubahan dalam teknik produksi, atau tantangan lainnya dalam proses distribusi dan pemasaran produk. Untuk menjaga kelangsungan usaha, kedua toko perlu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi produksinya agar dapat mengatasi tren penurunan tersebut.



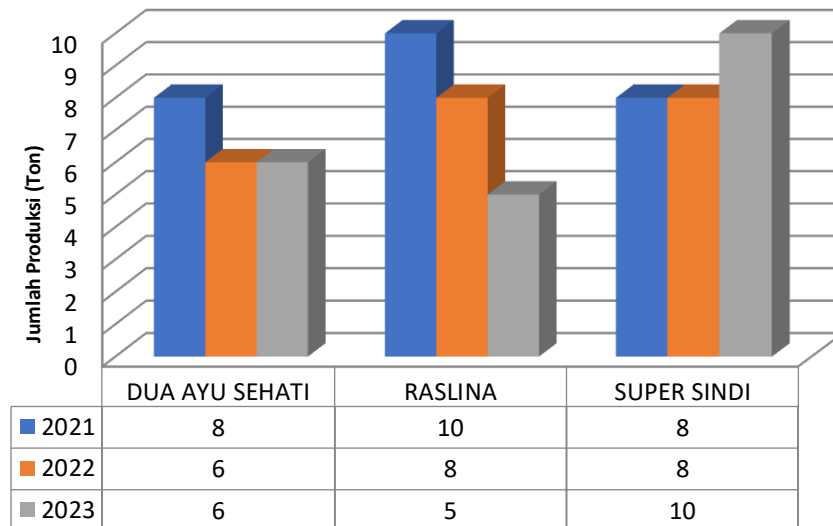
**Gambar 2.10 Produk Hasil Olahan Ikan (Kerupuk)
di Kota Pangkal Pinang**

Sumber: Hasil Survei, 2024

Berdasarkan Gambar 2.10, produksi kerupuk di Kota Pangkal Pinang menunjukkan tren penurunan pada kedua toko yang tercatat. Toko HOKI mengalami penurunan produksi dari 2,124 ton pada Tahun 2021 menjadi 1,75 ton pada Tahun 2022, sebelum sedikit meningkat menjadi 1,8 ton pada Tahun 2023. Meskipun ada sedikit pemulihan pada Tahun 2023, produksi toko ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2021.

Toko ANAM juga mengalami penurunan yang lebih tajam, dengan produksi turun dari 2 ton pada 2021 menjadi 1 ton pada 2022, dan tetap pada angka 1 ton pada 2023. Penurunan yang konsisten pada kedua toko ini mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan kapasitas produksi, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan atau masalah dalam proses produksi dan distribusi.

Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit pemulihan di Toko HOKI, penurunan yang terjadi pada kedua toko menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi.



**Gambar 2.11 Produk Hasil Olahan Ikan (Kericu)
di Kota Pangkal Pinang**

Sumber: Hasil Survei, 2024

Berdasarkan Gambar 2.11, produksi kericu di Kota Pangkal Pinang menunjukkan variasi yang berbeda antara ketiga toko yang ada. Toko Dua Ayu Sehati mengalami penurunan produksi dari 8 ton pada 2021 menjadi 6 ton pada 2022 dan 2023, mencerminkan stagnasi dalam kapasitas produksinya. Hal serupa terjadi pada Toko Raslina, yang produksinya turun dari 10 ton pada 2021 menjadi 5 ton pada 2023, menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Toko Super Sindi mencatatkan hasil yang berbeda, dengan produksi yang relatif stabil pada 8 ton pada 2021 dan 2022, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada 2023 menjadi 10 ton. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemampuan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kapasitas produksi, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya produksinya tidak mengalami perubahan besar.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada sebagian besar toko, Toko Super Sindi berhasil menunjukkan pertumbuhan yang positif. Peningkatan produksi pada toko ini bisa menjadi contoh keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi produksi kericu di Kota Pangkal Pinang.



2.1.5.2. Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner

Istilah ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh Howkins pada Tahun 2001. Namun, sejak Tahun 1997, Howkins telah menyadari adanya revolusi yang didasarkan pada kreativitas manusia dalam industri ekonomi (Sartika dkk, 2022). Menurut Badan Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah dari kreativitas yang dilindungi oleh kekayaan intelektual, dan bersumber dari pengelolaan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dalam konteks ini, unsur nilai tambah menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kreativitas. Ekonomi kreatif tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga mencakup nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan (BEKRAF, 2017).

Terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif di Provinsi Bangka Belitung yaitu aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, perikanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Pada Tahun 2023 Kota Pangkal Pinang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 5 kota kreatif dari 78 kabupaten/kota yang melakukan tahapan penilaian kota kreatif dengan subsektor ekonomi kreatifnya yaitu kuliner berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/102/DI.01.00/MK/2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia Tahun 2023 Tanggal 9 Oktober Tahun 2023.

Kuliner ditetapkan sebagai subsektor ekonomi kreatif unggulan Kota Pangkal Pinang yang diharapkan dapat menunjang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pangkal Pinang yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Penetapan kuliner sebagai subsektor ekonomi kreatif unggulan Kota Pangkal Pinang dengan produknya otak-otak dilakukan melalui rangkaian kegiatan uji petik PMK3I (Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif) yang berlangsung pada Tanggal 10 hingga 13 April 2023 dengan melibatkan pemangku kepentingan mulai



dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah daerah, dan media. Ekonomi kreatif berbasis kuliner merupakan salah satu sektor dalam ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan kreativitas dalam bidang makanan dan minuman. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari produksi, pengolahan, penyajian, hingga pemasaran produk kuliner yang memadukan aspek tradisi, budaya, dan inovasi. Ekonomi kreatif berbasis kuliner di Pangkal Pinang mencakup berbagai aspek mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran produk makanan dan minuman yang unik dan khas.

Dengan potensi yang dimiliki, ekonomi kreatif berbasis kuliner di Kota Pangkal Pinang dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal ini.

**Tabel 2.8 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD
Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner**

No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner				
1.	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi	Sudah tersedia reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Penataan berbasis data riset dan inovasi	Sudah dilakukan penataan berbasis data riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
C	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sudah tersedia pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
D	Pengelolaan destinasi wisata inovasi	Sudah tersedia pengelolaan destinasi wisata inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
E	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Sudah tersedia anggaran riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
F	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan	Sudah dilakukan peningkatan	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas	



No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner				
	intelektual		perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Sudah dilakukan penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sudah dilakukan proses penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Sudah dilakukan penguatan kemitraan antar kelembagaan		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
B	Peningkatan persebaran inovasi daerah	Sudah dilakukan peningkatan persebaran inovasi daerah		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
C	Mengimplementasikan hasil riset dan inovasi di daerah	Sudah mengimplementasikan hasil riset dan inovasi IPTEK di daerah		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
4.	Budaya Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Promosi dan kampanye riset dan inovasi daerah	Sudah melakukan kampanye riset dan inovasi daerah		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
B	Apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	Sudah melakukan apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
C	Pengembangan mitra usaha berbasis riset	Sudah melakukan pengembangan mitra usaha berbasis riset		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
D	Investarisasi, pengembangan dan perlindungan IPTEK masyarakat	Sudah melakukan investarisasi, pembangunan, dan perlindungan IPTEK masyarakat		Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Inisiasi pengembangan riset dan	Sudah melakukan		Bapperida, Dinas



No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner				
	inovasi daerah	inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah	Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Sudah melakukan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
C	Keselaran implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sudah melakukan keselaran implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
6.	Penyelarasan Dengan Perkembangan Global			
A	Peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah	Sudah lakukan peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	
B	Penguatan kerjasama internasional	Sudah melakukan penguatan kerjasama internasional	Bapperida, Dinas Pariwisata, Dinas Industri dan UMKM, Diskopdag dan OPD terkait	

Sumber: Data diolah, 2024

Di Kota Pangkal Pinang hanya terdapat satu pelaku usaha yang masuk kategori menengah, beberapa pelaku dengan skala mikro, sedangkan kebanyakan lainnya adalah pelaku usaha skala ultramikro atau rumah tangga perseorangan. Pelaku usaha otak-otak antara lain :

1. Otak-otak ASE

Otak-otak adalah salah satu makanan khas yang sangat digemari. Pasar untuk otak-otak sangat luas, mulai dari konsumen lokal hingga wisatawan yang berkunjung ke Pangkal Pinang. Salah satu pelaku usaha otak-otak yang terbesar dan termasuk kategori skala usaha menengah di Pangkal Pinang adalah otak-otak ASE. Otak-otak ASE berdiri sejak Tahun 2006 dan saat ini terdapat beberapa cabang di Kota Pangkal Pinang dan di Tangerang tepatnya di Gading Serpong.



Otak-otak yang disajikan terdiri dari beberapa varian yaitu: otak-otak daun; otak-otak rebus, ampiang dan bujan . Yang semuanya berbahan baku ikan, dengan cuka terdiri dari 3 varian yaitu tauco, cabe dan terasi

Usaha Otak-otak ASE telah menunjukkan kestabilan yang signifikan dari Tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan data, volume produksi tetap stabil selama tiga tahun berturut-turut di angka 1.095.000 pcs per tahun, dengan harga jual yang juga konsisten sebesar Rp3.000/pcs. Ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap otak-otak berada pada level yang solid dan terjaga, memungkinkan usaha ini terus berjalan tanpa adanya fluktuasi yang signifikan dalam produksi maupun harga.

Dalam hal ekspansi, jumlah cabang usaha otak-otak mengalami perubahan dari tiga cabang pada Tahun 2021, bertambah menjadi empat cabang di Tahun 2022, namun kembali menjadi tiga cabang pada Tahun 2023. Ini mencerminkan upaya bisnis untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan efisiensi operasional. Meskipun jumlah cabang berkurang pada Tahun 2023, stabilitas produksi menunjukkan bahwa kapasitas pabrik dan daya saing produk tetap kuat.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini berkisar antara 70 hingga 80 orang selama periode tiga tahun tersebut, yang berarti usaha otak-otak ASE telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi puluhan orang secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan skala usaha yang cukup besar dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Dengan keuntungan yang dihasilkan dari harga jual stabil dan volume produksi besar, usaha otak-otak ini menawarkan prospek yang baik untuk terus berkembang. Strategi mempertahankan kualitas produk



dan efisiensi operasional menjadi kunci keberhasilan usaha ini dalam jangka panjang.

2. Otak-otak FUNG FUNG

Otak-otak FUNG FUNG berada di Jl. Yang Zubaidah No. 150 atau Jl. Kampung Bintang Luar No. 150, Kota Pangkal Pinang. Menu yang disediakan adalah pempek panjang, engpiang, pempek bulat, bujan, dan pempek udang serta otak-otak daun yang paling banyak diminati para pengunjung.

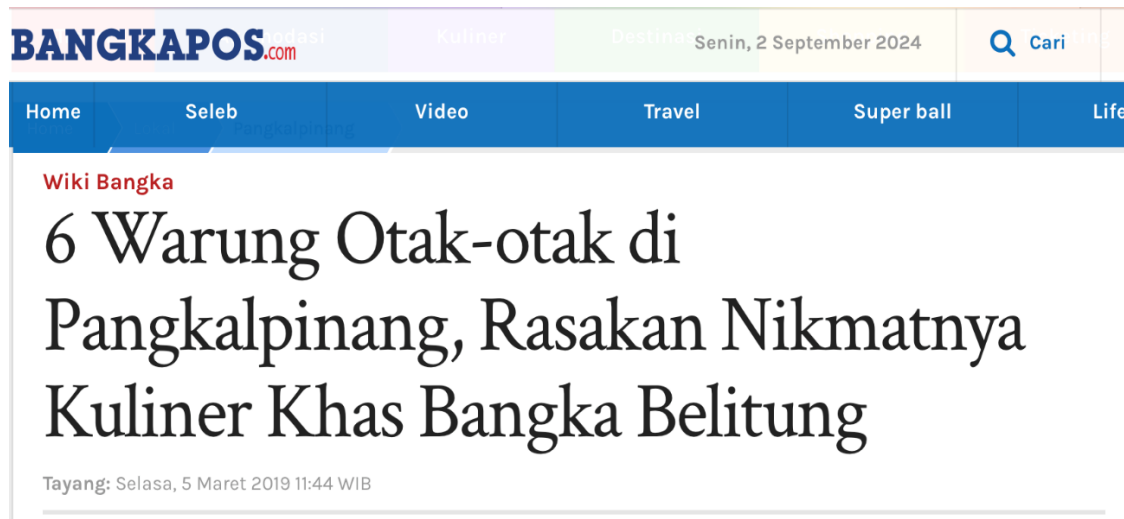


Gambar 2.12 Kuliner Otak-otak Khas Kota Pangkal Pinang

Sumber: Google Image, 2024

Beberapa media massa lokal telah mengulas terkait potensi otak-otak sebagai kuliner khas Kota Pangkal Pinang.





3. Otak-otak Henny

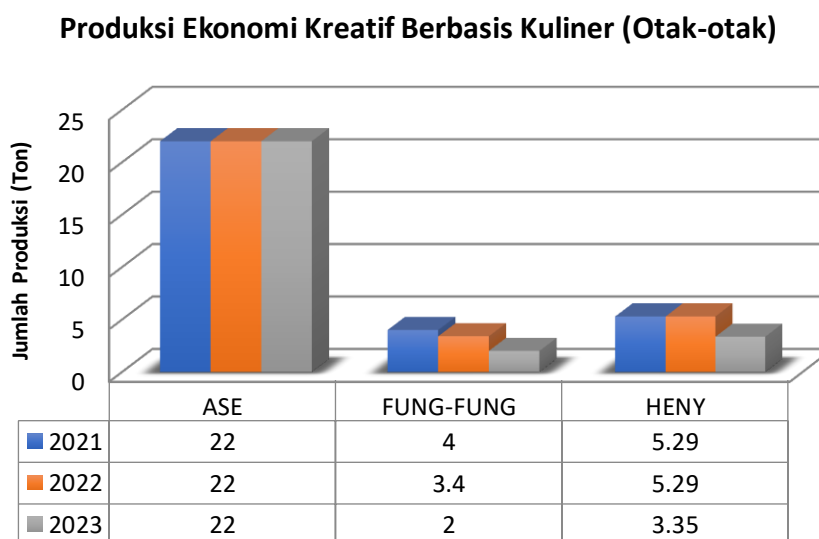
Selain otak-otak ASE dan otak-otak Graha, salah satu pelaku usaha otak-otak yang terkenal di Pangkal Pinang yaitu otak-otak Henny. Berlokasi di Jl. Fatmawati otak-otak ini menjadi salah satu pelaku usaha otak-otak yang termasuk kategori skala mikro di Kota Pangkal Pinang. Dari sisi produksi, data menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 dan 2022, usaha ini mampu menghasilkan 5.475 kg otak-otak per tahun. Namun, pada Tahun 2023 terjadi penurunan produksi menjadi 3.650 kg. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan



permintaan pasar, pasokan bahan baku, atau efisiensi operasional. Meskipun terjadi penurunan dalam produksi, harga jual tetap stabil pada Rp2.500/pcs selama tiga tahun berturut-turut, kondisi ini menunjukkan komitmen usaha untuk mempertahankan keterjangkauan bagi konsumen.

Dalam hal keuntungan, usaha ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp.547.500.000 pada Tahun 2021 dan 2022, seiring dengan tingkat produksi yang tinggi. Namun, dengan penurunan produksi pada Tahun 2023, keuntungan menurun menjadi Rp383.250.000. Ini merupakan penurunan yang sebanding dengan berkurangnya *output*, namun tetap menunjukkan bahwa usaha ini masih menghasilkan keuntungan.

Menariknya, meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi, jumlah cabang dan tenaga kerja tetap stabil. Sejak Tahun 2021 hingga 2023, usaha ini dioperasikan melalui satu cabang dengan dua orang tenaga kerja. Ini mencerminkan skala usaha yang relatif kecil namun efisien dalam pengelolaan sumber daya. Keberhasilan bisnis dengan tenaga kerja minimal menunjukkan bahwa usaha otak-otak ini dikelola secara efektif, meski masih ada ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi di masa depan.



**Gambar 2.13 Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner (Otak-Otak)
di Kota Pangkal Pinang**

Sumber: Hasil Survei, 2024



Berdasarkan Gambar 2.13, otak-otak ASE menunjukkan kestabilan produksi yang konsisten setiap tahun, mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan kapasitas produksi. Sementara itu, otak-otak FUNG-FUNG dan HENY mengalami penurunan yang signifikan dalam produksi, dengan FUNG-FUNG mengalami penurunan yang lebih tajam, hampir setengah dari produksi awal, dan HENY juga mengalami penurunan meski tidak sebesar FUNG-FUNG. Penurunan ini dapat menunjukkan adanya masalah dalam permintaan pasar atau efektivitas operasional di kedua toko tersebut, sementara ASE berhasil menjaga stabilitas produksinya. Perbedaan tren ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti persaingan, perubahan selera konsumen, atau masalah internal di masing-masing toko.

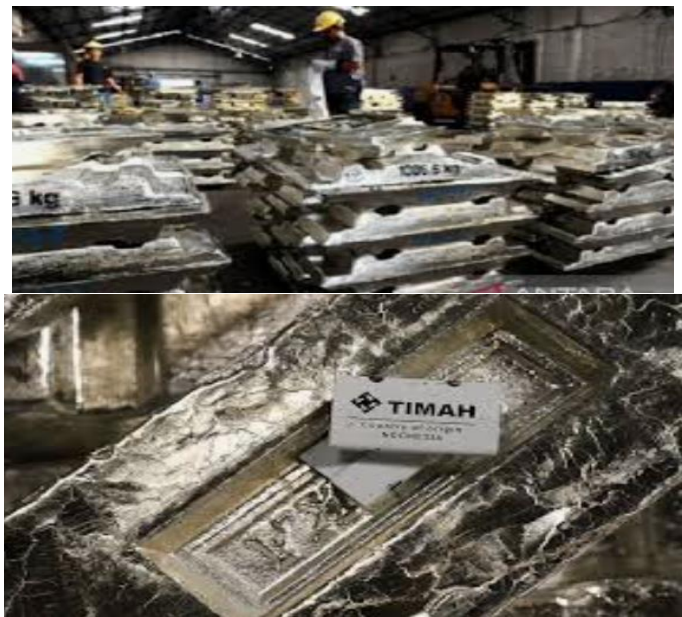


2.1.5.3. Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk

Hilirisasi timah merupakan proses pengolahan dan pemanfaatan timah agar menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Hilirisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas tersebut. Di Kota Pangkal Pinang, yang merupakan salah satu pusat industri timah di Indonesia, pabrik pengolahan timah terdapat diantaranya di Ketapang, diharapkan pengembangan produk berbasis timah dapat memperkuat ekonomi lokal. Ketika dilakukan hilirisasi maka manfaat yang dapat diperoleh diantaranya: (1) **Mendapatkan *value added***, dengan mengolah timah menjadi produk yang lebih kompleks seperti solder, baterai, atau komponen elektronik, nilai tambah produk meningkat dibandingkan hanya menjual timah dalam bentuk bijih atau logam mentah; (2) **Menambah lapangan pekerjaan**, industri hilirisasi timah membuka peluang kerja baru dalam berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, dan layanan industri yang tentunya berdampak terhadap pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) **Diversifikasi ekonomi**, hilirisasi timah membantu diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri; (4) **Pengembangan teknologi dan inovasi**, proses



hilirisasi sering kali memerlukan teknologi dan inovasi terbaru, yang dapat mendorong kemajuan teknologi di sektor-sektor terkait dan meningkatkan daya saing industri; (5) **Peningkatan ekspor daerah**, karena kontribusi ekspor berbahan baku timah sangat tinggi dibandingkan non timah. Secara keseluruhan, hilirisasi timah membawa banyak manfaat yang tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pengembangan teknologi.



Gambar 2.14 Produk Timah
Sumber: Google Image, 2024

Berikut ini merupakan pemetaan kondisi ekosistem riset dan inovasi hilirisasi timah dengan pengembangan produk

Tabel 2.9 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk

No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk				
1.	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi	Sudah tersedia reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk	
B	Penataan berbasis data riset dan inovasi	Sudah dilakukan penataan berbasis data riset dan inovasi	Bapperida dan PT Timah Tbk	
C	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sudah tersedia pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Bapperida dan PT Timah Tbk	
D	Pengelolaan destinasi wisata	Sudah tersedia	Bapperida dan PT	



No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk				
	inovasi		pengelolaan destinasi wisata inovasi	Timah Tbk
E	Penyediaan anggaran riset dan inovasi		Sudah tersedia anggaran riset dan inovasi	Bapperida dan PT Timah Tbk
F	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual		Sudah dilakukan peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida dan PT Timah Tbk
2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan		Sudah dilakukan penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bapperida dan PT Timah Tbk
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah		Sudah dilakukan proses penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk
3. Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah				
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan		Sudah dilakukan penguatan kemitraan antar kelembagaan	Bapperida dan PT Timah Tbk
B	Peningkatan persebaran inovasi daerah		Sudah dilakukan peningkatan persebaran inovasi daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk
C	Mengimplementasikan hasil riset dan inovasi di daerah		Sudah mengimplementasikan hasil riset dan inovasi di daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk
4. Budaya Riset dan Inovasi di Daerah				
A	Promosi dan kampanye riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan kampanye riset dan inovasi daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk
B	Apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk
C	Pengembangan mitra usaha berbasis riset		Sudah melakukan pengembangan mitra usaha berbasis riset	Bapperida dan PT Timah Tbk
D	Investarisasi, pengembangan dan perlindungan IPTEK masyarakat		Sudah melakukan investarisasi, pembangunan, dan perlindungan IPTEK masyarakat	Bapperida dan PT Timah Tbk
5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah				
A	Inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk



No	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk				
B	Pengembangan klaster inovasi berbasis PUD		Sudah melakukan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Bapperida dan PT Timah Tbk
C	Keselaran implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah		Sudah melakukan keselaran implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk
6.	Penyelarasan Dengan Perkembangan Global			
A	Peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah		Sudah lakukan peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida dan PT Timah Tbk
B	Penguatan kerjasama internasional		Sudah melakukan penguatan kerjasama internasional	Bapperida dan PT Timah Tbk

Sumber: Data diolah, 2024



2.1.5.4. Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya

Mengembangkan desa wisata berbasis ekowisata dan budidaya di Kota Pangkal Pinang dapat menjadi strategi yang efektif untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan serta melestarikan budaya lokal. Di Kota Pangkal Pinang terdapat Kampung Ekowisata SEJAGAT (Selindung-Jerambah Gantung) merupakan kampung wisata edukasi alam dan budaya yang secara kewilayahan berada di Kelurahan Selindung dan Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek. Lokasi Kampung Ekowisata SEJAGAT sangat mudah diakses oleh wisatawan karena berada tidak jauh dari pusat Kota Pangkal Pinang. Di Kampung Ekowisata SEJAGAT terdapat beragam daya tarik wisata seperti Jembatan Jerambah Gantung, Tugu Ketam Remangok, Sensasi Studio Fantasy, pusat kuliner dan penjualan ketam remangok, pusat pembudidayaan ketam remangok, *workshop* pembuatan keripik singkong, *workshop* pembuatan kain tenun cual, *workshop* pembuatan tudung saji, sanggar seni tempat belajar tari



tradisional, pusat jajanan asinan buah dan terbentang pesona keindahan Sungai Selindung yang dapat dinikmati wisatawan dengan menyusuri sungai menggunakan perahu nelayan.



Gambar 2.15 Pengembangan Desa Wisata SEJAGAT

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Pengembangan desa wisata juga disertai dengan budidaya kepiting bakau di Kota Pangkal Pinang yang menawarkan peluang besar dalam menggabungkan aspek konservasi lingkungan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kepiting bakau, yang hidup di ekosistem mangrove, menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar, sekaligus simbol keberlanjutan ekosistem pesisir. Desa wisata ini berpotensi menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan yang tertarik pada wisata alam, pendidikan lingkungan, dan petualangan kuliner. Pengembangan desa wisata berbasis budidaya kepiting bakau di Pangkal Pinang ini juga melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Melalui pelatihan dan pemberdayaan, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem mangrove, mengelola tambak kepiting secara berkelanjutan, dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Dengan perpaduan antara edukasi lingkungan, pengalaman wisata, dan pemberdayaan masyarakat, desa wisata berbasis budidaya kepiting bakau di Pangkal Pinang siap menjadi destinasi unggulan yang mendukung pariwisata berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.



**Tabel 2.10 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD
Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya**

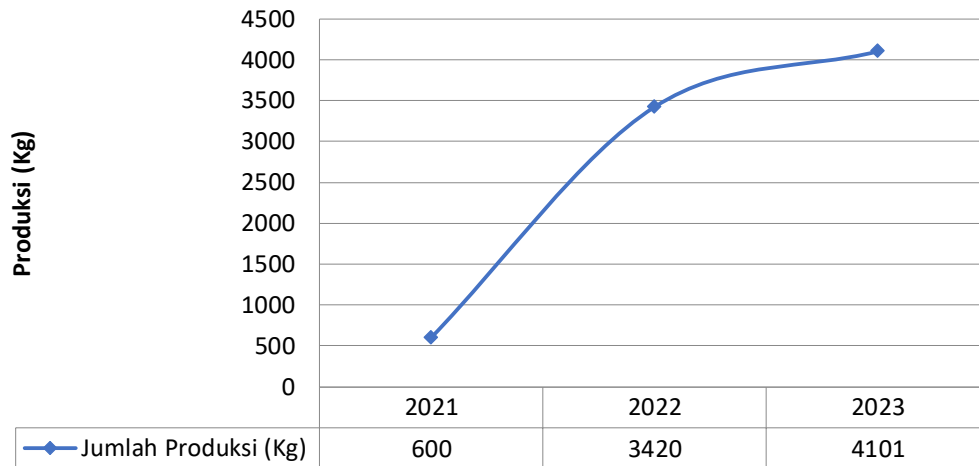
No	Prioritas PUD / Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya				
1.	Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi	Sudah tersedia reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
B	Penataan berbasis data riset dan inovasi	Sudah dilakukan penataan berbasis data riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
C	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sudah tersedia pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
D	Pengelolaan destinasi wisata inovasi	Sudah tersedia pengelolaan destinasi wisata inovasi	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
E	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Sudah tersedia anggaran riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
F	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Sudah dilakukan peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Sudah dilakukan penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sudah dilakukan proses penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
3.	Kemitraan riset dan inovasi di daerah			
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Sudah dilakukan penguatan kemitraan antar kelembagaan	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
B	Peningkatan persebaran inovasi daerah	Sudah dilakukan peningkatan persebaran inovasi daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
C	Mengimplementasikan hasil	Sudah	Bapperida, Dinas	



No	Prioritas PUD / Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya				
	riset dan inovasi di daerah		mengimplementasikan hasil riset dan inovasi di daerah	Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
4.	Budaya Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Promosi dan kampanye riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan kampanye riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
B	Apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
C	Pengembangan mitra usaha berbasis riset		Sudah melakukan pengembangan mitra usaha berbasis riset	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
D	Investarisasi, pengembangan dan perlindungan IPTEK masyarakat		Sudah melakukan investarisasi, pembangunan, dan perlindungan IPTEK masyarakat	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah			
A	Inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
B	Pengembangan klaster inovasi berbasis PUD		Sudah melakukan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
C	Keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah		Sudah melakukan keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
6.	Penyelarasan Dengan Perkembangan Global			
A	Peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
B	Penguatan kerjasama internasional		Sudah melakukan penguatan kerjasama internasional	Bapperida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya

Sumber: Data diolah, 2024

Berikut ini merupakan data dari budidaya kepiting bakau di Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2023:



Gambar 2.16 Jumlah Produksi Kepiting Bakau (Kg) di Kota Pangkal Pinang

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, 2024

Berdasarkan Gambar 2.16, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam produksi kepiting bakau di Kota Pangkal Pinang dari Tahun 2021 hingga 2023. Pada Tahun 2021, produksi tercatat sebesar 600 kg, kemudian melonjak drastis pada Tahun 2022 menjadi 3.420 kg. Puncak tertinggi tercatat pada Tahun 2023 dengan jumlah produksi mencapai 4.101 kg. Secara keseluruhan, produksi kepiting bakau di Kota Pangkal Pinang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan Tahun 2023 mencatatkan jumlah produksi tertinggi.

Tabel 2.11 Produksi Kepiting Bakau di Kota Pangkal Pinang

Tahun	Jumlah Produksi (Kg)	Harga (Rp)	Nilai Produksi (Rp)
2021	600	140.000	84.000.000
2022	3.420	135.000	461.700.000
2023	4.101	120.000	492.120.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkal Pinang, 2024

Berdasarkan Tabel 2.11, dari Tahun 2021 hingga 2023, terjadi fluktuasi harga dan nilai produksi kepiting bakau di Kota Pangkal Pinang. Harga per kilogram kepiting bakau tercatat paling tinggi pada Tahun 2021, yaitu Rp140.000, dan terus mengalami penurunan pada tahun berikutnya, dengan harga terendah pada Tahun 2023, yakni Rp120.000.



Meski harga cenderung menurun, nilai produksi menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nilai produksi Tahun 2021 berada di angka Rp84.000.000, sementara pada Tahun 2022 nilai tersebut melonjak signifikan menjadi Rp461.700.000. Peningkatan terus berlanjut hingga Tahun 2023, dengan nilai produksi mencapai Rp492.120.000, yang merupakan nilai tertinggi selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun harga kepiting bakau mengalami penurunan, nilai total produksi menunjukkan perkembangan yang sangat positif, terutama pada Tahun 2023 yang mencatatkan nilai tertinggi.



2.1.5.5. Wisata Budaya Berbasis Potensi Lokal

Kota Pangkal Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak hanya dikenal dengan keindahan pantainya tetapi juga kaya akan warisan budaya yang unik dan beragam. Kekhasan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menjadi salah satu aset penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Tradisi, seni, kuliner, serta adat istiadat masyarakat Melayu yang kental di Kota Pangkal Pinang menciptakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Wisata budaya berbasis kekhasan lokal menawarkan pengalaman yang autentik dan mendalam, memungkinkan wisatawan untuk memahami, menghargai, dan terlibat langsung dalam kehidupan budaya masyarakat setempat. Di Kota Pangkal Pinang, berbagai potensi budaya, mulai dari seni tari, musik tradisional, festival adat, hingga kerajinan khas, telah menjadi bagian dari daya tarik yang memikat. Selain itu, kuliner lokal yang menggugah selera menjadi pelengkap yang memperkaya perjalanan wisata budaya di kota ini. Dengan sinergi antara pelestarian budaya dan pengembangan wisata, Kota Pangkal Pinang memiliki peluang besar untuk menjadikan wisata budaya sebagai salah satu sektor unggulan. Wisata ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam melestarikan identitas budaya masyarakat di tengah arus modernisasi.



**Tabel 2.12 Pemetaan Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi PUD
Wisata Budaya Berbasis Potensi Lokal**

No	Prioritas PUD / Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Wisata Budaya Berbasis Kekhasan Lokal				
1.	Kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Reformasi kebijakan riset dan inovasi	Sudah tersedia reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
B	Penataan berbasis data riset dan inovasi	Sudah dilakukan penataan berbasis data riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
C	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sudah tersedia pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
D	Pengelolaan destinasi wisata inovasi	Sudah tersedia pengelolaan destinasi wisata inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
E	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Sudah tersedia anggaran riset dan inovasi	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
F	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Sudah dilakukan peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Sudah dilakukan penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
B	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sudah dilakukan proses penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	
3.	Kemitraan riset dan inovasi di daerah			
A	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Sudah dilakukan penguatan kemitraan antar kelembagaan	Bapperida, dinas pariwisata, dan OPD lainnya	
B	Peningkatan persebaran inovasi daerah	Sudah dilakukan peningkatan persebaran inovasi daerah	Bapperida, dinas pariwisata, dan OPD lainnya	
C	Mengimplementasikan hasil riset dan inovasi di daerah	Sudah mengimplementasikan hasil riset dan inovasi daerah	Bapperida, dinas pariwisata, dan OPD lainnya	
4.	Budaya Riset dan Inovasi di Daerah			
A	Promosi dan kampanye riset dan inovasi daerah	Sudah melakukan kampanye riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya	



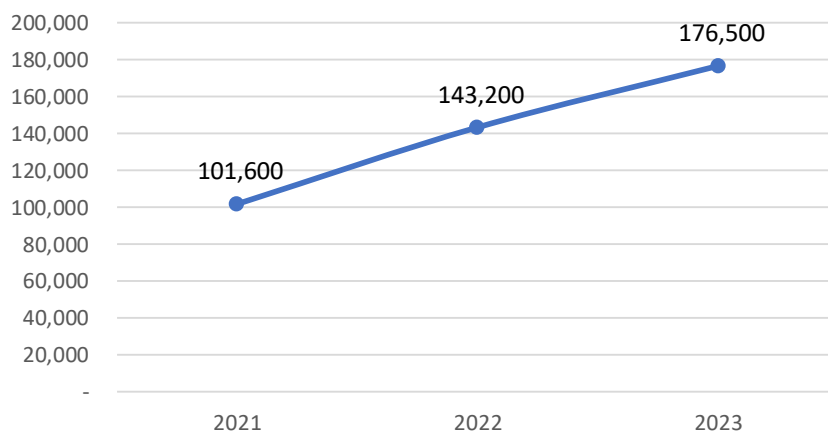
No	Prioritas PUD / Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Wisata Budaya Berbasis Kekhasan Lokal				
B	Apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	Bapperida, dinas pariwisata, dan OPD lainnya
C	Pengembangan mitra usaha berbasis riset		Sudah melakukan pengembangan mitra usaha berbasis riset	Bapperida, dinas pariwisata, dan OPD lainnya
D	Investarisasi, pengembangan dan perlindungan IPTEK masyarakat		Sudah melakukan investarisasi, pembangunan, dan perlindungan IPTEK masyarakat	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
5. Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah				
A	Inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah		Sudah melakukan inisiasi pengembangan riset dan inovasi daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
B	Pengembangan klaster inovasi berbasis PUD		Sudah melakukan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
C	Keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah		Sudah melakukan keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
6. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global				
A	Peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah		Sudah terdapat wacana pengembangan mega proyek <i>Pasir Padi Waterfront City</i> atau kota baru di atas air terbesar se-Asia Tenggara namun belum terlaksana dengan optimal Belum dilakukan peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah untuk tua tunu	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya
B	Penguatan kerjasama internasional		Belum melakukan Penguatan Kerjasama Internasional	Bapperida, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya

Sumber: Data diolah, 2024

Lokasi wisata budaya berbasis potensi lokal yang berada di Kota Pangkal Pinang yaitu Pantai Pasir Padi dan Tua Tunu. Pantai Pasir Padi, yang berlokasi di Kelurahan Temberan, sekitar 8 km dari pusat Kota



Pangkal Pinang, merupakan salah satu destinasi wisata potensial di wilayah ini. Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang 2 km dengan hamparan pasir putih. Keistimewaannya terletak pada struktur pantainya yang landai dan pasirnya yang padat, sehingga nyaman untuk berjalan kaki maupun dilalui kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Kawasan wisata ini telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti hotel resor, restoran, toko souvenir, arena bermain anak, area *outbound*, fasilitas ketangkasan, serta olahraga air. Di sepanjang pantai, terdapat rumah makan yang menyajikan aneka hidangan laut, seperti ikan, kepiting, cumi, dan kerang, dengan harga yang terjangkau.

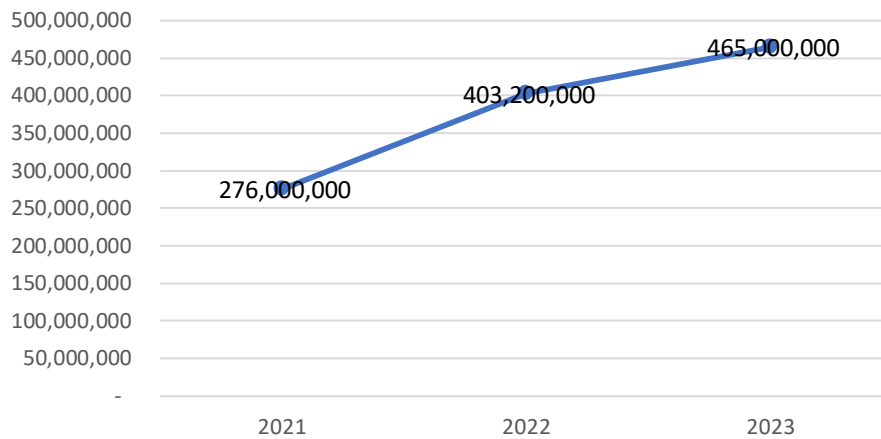


Gambar 2.17 Jumlah Pengunjung Pantai Pasir Padi Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang diperoleh data bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pasir Padi. Pada Tahun 2021 tercatat jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 101.600 orang, kemudian meningkat di Tahun 2022 sebanyak 143.200 orang dan meningkat kembali di Tahun 2023 sebanyak 176.500.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, maka hal ini tentu juga akan meningkatkan jumlah pendapatan dari destinasi wisata Pantai Pasir Padi. Berikut merupakan gambar jumlah pendapatan Pantai Pasir Padi tahun 2021-2023:



Gambar 2.18 Pendapatan Pantai Pasir Padi

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, 2024

Gambar 2.18 menunjukkan tren peningkatan pendapatan yang diperoleh dari sektor wisata di Pantai Pasir Padi selama tiga tahun terakhir (2021–2023). Pada Tahun 2021, keuntungan yang tercatat adalah Rp276.000.000. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan pada Tahun 2022 sebesar 46% atau mencapai Rp403.200.000. Hal ini terus berlanjut hingga Tahun 2023, dengan keuntungan yang meningkat sebesar 15% atau menjadi Rp465.000.000.

Peningkatan dari jumlah wisatawan dan total pendapatan ini mencerminkan semakin berkembangnya daya tarik Pantai Pasir Padi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Pangkal Pinang. Tren positif ini juga menandakan keberhasilan strategi promosi pariwisata yang dijalankan pemerintah setempat, sekaligus memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Selain Pantai Pasir Padi salah satu wilayah yang saat ini berpotensi untuk dikembangkan yaitu Tua Tunu. Tua Tunu, sebuah kawasan di Kota Pangkal Pinang menyimpan kekayaan budaya lokal yang menarik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu tempat yang masih menjaga tradisi dan kearifan lokal masyarakat Melayu Bangka, yang diwariskan secara turun-temurun.

Di Tua Tunu, pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman budaya khas melalui beragam kegiatan, seperti pertunjukan seni tradisional, festival budaya, dan lokakarya kerajinan tangan khas Bangka,



seperti anyaman rotan atau batik motif Bangka. Selain itu, kuliner khas Melayu juga menjadi daya tarik tersendiri, dengan menu tradisional seperti lempah kuning, getas, dan kerupuk kemplang yang menggugah selera. Wisata budaya di Tua Tunu juga mencakup eksplorasi nilai-nilai spiritual melalui kunjungan ke situs-situs bersejarah atau tempat ibadah yang mencerminkan harmoni kehidupan masyarakat setempat. Keunikan adat istiadat, upacara tradisional, dan cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat Tua Tunu dapat menjadi pengalaman edukatif dan memperkaya wawasan para wisatawan.

Pengembangan wisata budaya di Tua Tunu diharapkan mampu melestarikan warisan budaya lokal sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi dan identitas budaya Kota Pangkal Pinang.



Gambar 2.19 Wisata Budaya

Sumber: Google Image, 2024

Tua Tunu juga direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kebun Raya yang berperan sebagai pusat pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati di Kota Pangkal Pinang. Dengan potensi keanekaragaman hayati yang dimilikinya, kawasan ini akan menjadi wadah konservasi berbagai spesies flora dan fauna lokal, sekaligus berfungsi sebagai laboratorium alam untuk penelitian dan edukasi lingkungan.

Pengembangan Kebun Raya Tua Tunu juga diharapkan menjadi daya tarik wisata berbasis alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan.



Selain itu, kawasan ini dapat menjadi ruang terbuka hijau yang memberikan manfaat ekologis, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon, dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Sebagai upaya mendukung program ini, akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, seperti taman tematik, area rekreasi edukatif, jalur pejalan kaki, dan pusat informasi lingkungan. Dengan demikian, Tua Tunu tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga menjadi aset strategis bagi pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati di tingkat nasional.



2.1.6. Permasalahan Utama Daerah

Permasalahan utama daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Pangkal Pinang adalah (1) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung ketahanan pangan; [2] Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air; [3] Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana; [4] Perlunya percepatan transformasi digital; [5] Belum optimalnya hilirisasi produk pada sektor produktif; [6] Belum optimalnya penyediaan pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim; [7] Belum optimalnya pengelolaan pasar; [8] Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri; [9] Perlunya penguatan infrastruktur sektor produktif; [10] Belum optimalnya adopsi teknologi dan sarana prasarana di bidang kelautan untuk mendukung industri perikanan; [11] Masih rendahnya adopsi teknologi bagi UMKM dan sektor perdagangan dalam mendukung efisiensi dan produktivitas; [12] Angka pengangguran masih tinggi; [13] Belum optimalnya pemetaan dan target optimalisasi potensi generasi emas Kota Pangkal Pinang; [14] Belum optimalnya penguatan mutu infrastruktur kesehatan; dan [15] Belum optimalnya pembangunan sarana olahraga dan ketidakselarasan pembangunan kepemudaan. Dengan mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah ini secara efektif, Kota Pangkal Pinang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya dan memanfaatkan potensi yang ada untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.



Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang memiliki keterkaitan dalam riset dan inovasi daerah yaitu sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan

Riset dan inovasi dapat berperan dalam mendesain sistem pertanian modern yang efisien serta menciptakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pangan lokal, hal ini menjadi penting di Kota Pangkal Pinang dikarenakan Kota Pangkal Pinang sendiri merupakan daerah urban yang tidak memiliki lahan yang luas sehingga menjadikan tantangan dalam ketahanan pangan.

2. Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air

Dengan riset yang terfokus pada pengelolaan sumber daya air, Kota Pangkal Pinang dapat mengadopsi teknologi pengolahan air bersih, sistem pengendalian banjir, serta konservasi air yang berkelanjutan. Inovasi ini akan mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan air untuk masa depan.

3. Perlunya Percepatan Transformasi Digital

Percepatan transformasi digital di Kota Pangkal Pinang membutuhkan riset yang mendorong pengembangan infrastruktur teknologi informasi serta pelatihan sumber daya manusia. Inovasi digital dapat diaplikasikan di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar.

4. Belum Optimalnya Hilirisasi Produk pada Sektor Produktif

Belum optimalnya hilirisasi produk pada sektor produktif di Kota Pangkal Pinang merupakan tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal. Hilirisasi merupakan kunci penting dalam menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih panjang, sehingga mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dalam konteks ini, pengembangan riset dan inovasi menjadi solusi strategis untuk mendukung percepatan hilirisasi produk di Kota Pangkal Pinang. Melalui riset terapan, dapat dilakukan pengembangan teknologi pengolahan yang



modern dan efisien untuk berbagai sektor produktif, seperti perikanan, pertanian, dan pertambangan. Misalnya, inovasi dalam teknologi pengemasan ekspor dan pengawetan hasil laut, seperti ikan dan getas (produk olahan ikan), dapat memperpanjang masa simpan sekaligus meningkatkan daya tarik produk di pasar nasional dan internasional. Selain itu, riset juga dapat membantu mengidentifikasi peluang diversifikasi produk lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, hasil pertanian dan perikanan dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, seperti produk makanan beku, abon ikan, atau camilan berbahan dasar hasil laut yang kreatif. Dengan demikian, produk lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga dalam bentuk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Untuk di pertambangan, dengan adanya hilirisasi produk tambang seperti timah maka akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi Kota Pangkal Pinang.

Inovasi juga berperan penting dalam mendukung pemasaran digital untuk produk-produk hilirisasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha dapat memasarkan produknya melalui *platform e-commerce*, sehingga akses pasar menjadi lebih luas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan institusi pendidikan tinggi di Kota Pangkal Pinang dapat mendorong terciptanya pusat riset dan inovasi yang berfokus pada hilirisasi produk.

Dengan pengembangan riset dan inovasi yang terintegrasi, hilirisasi sektor produktif di Kota Pangkal Pinang dapat berjalan lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah produk lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat posisi Kota Pangkal Pinang sebagai pusat ekonomi kreatif dan produktif di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Belum Optimalnya Penyediaan Pengelolaan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah, serta tantangan terkait perubahan iklim menjadi isu yang mendesak untuk ditangani di Kota Pangkal Pinang. Sebagai kota



yang terus berkembang, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menghasilkan volume sampah yang semakin besar, sementara sistem pengelolaan yang ada belum sepenuhnya memadai. Untuk menjawab tantangan ini, pengembangan riset dan inovasi memainkan peran strategis dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang berbasis teknologi.

Melalui riset terapan, Kota Pangkal Pinang dapat mengembangkan teknologi daur ulang yang efektif dan efisien untuk mengolah sampah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti plastik, dapat didaur ulang menjadi bahan baku untuk industri kreatif atau konstruksi. Selain itu, inovasi dalam sistem pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan, seperti teknologi *waste-to-energy*, memungkinkan sampah diubah menjadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Riset juga dapat diarahkan untuk mendesain sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berbasis digital. Dengan memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT), kota ini dapat menerapkan sistem pemantauan pengelolaan sampah secara *real-time*, mulai dari pengumpulan, transportasi, hingga pengolahan akhir. Inovasi semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain itu, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kota Pangkal Pinang dapat didukung melalui riset yang fokus pada pengelolaan lingkungan berbasis ekosistem. Contohnya, pengembangan teknologi hijau untuk mengurangi emisi karbon, konservasi hutan mangrove untuk mencegah abrasi, serta pelibatan masyarakat dalam program edukasi dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Pengembangan riset dan inovasi ini harus didukung oleh sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Kota Pangkal Pinang dapat menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang modern, berkelanjutan, dan tanggap terhadap perubahan iklim. Pada akhirnya, langkah ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan



kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk masa depan yang lebih baik.

6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Kawasan Industri

Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri di Kota Pangkal Pinang menjadi salah satu tantangan yang mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi lokal. Kawasan industri yang dirancang untuk menjadi pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah, seperti hasil perikanan, masih belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan teknologi, infrastruktur, serta pengelolaan yang efektif. Dalam hal ini, pengembangan riset dan inovasi dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong pemanfaatan kawasan industri secara optimal.

Riset dan inovasi juga berperan dalam mendukung desain tata kelola kawasan industri yang lebih terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan otomatisasi, kawasan industri dapat dikembangkan menjadi "*smart industrial zones*" yang memanfaatkan sistem berbasis data untuk mengelola produksi, distribusi, dan pemasaran secara efisien. Inovasi ini juga memungkinkan integrasi antara pelaku usaha besar, UMKM, dan sektor kreatif untuk menciptakan ekosistem industri yang inklusif.

Selain itu, pengembangan kawasan industri juga memerlukan inovasi dalam pelatihan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program pelatihan berbasis riset dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan mampu mengoperasikan teknologi modern di kawasan industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha menjadi kunci penting dalam mendukung terciptanya inovasi ini.

Dengan pengembangan riset dan inovasi yang terencana, kawasan industri di Kota Pangkal Pinang dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi produktif yang mendukung hilirisasi produk lokal, meningkatkan daya saing global, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Hal ini

akan menjadikan kawasan industri sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi Kota Pangkal Pinang di masa depan.

7. Belum Optimalnya Adopsi Teknologi dan Sarana Prasarana di Bidang Kelautan untuk Mendukung Industri Perikanan

Belum optimalnya adopsi teknologi dan sarana prasarana di bidang kelautan menjadi salah satu kendala yang menghambat pengembangan industri perikanan di Kota Pangkal Pinang. Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan riset dan inovasi dapat menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan.

Melalui riset dan inovasi dapat mengembangkan sarana prasarana pendukung seperti pelabuhan perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta fasilitas penyimpanan seperti *cold storage*. Melalui riset, fasilitas ini dapat dikembangkan menjadi lebih modern dan efisien, sehingga mendukung distribusi hasil laut dengan kualitas yang terjaga hingga ke pasar domestik dan internasional. Selain itu, riset dalam pengolahan hasil laut dapat mendorong hilirisasi produk, seperti pembuatan produk olahan ikan yang memiliki nilai tambah yang tinggi.



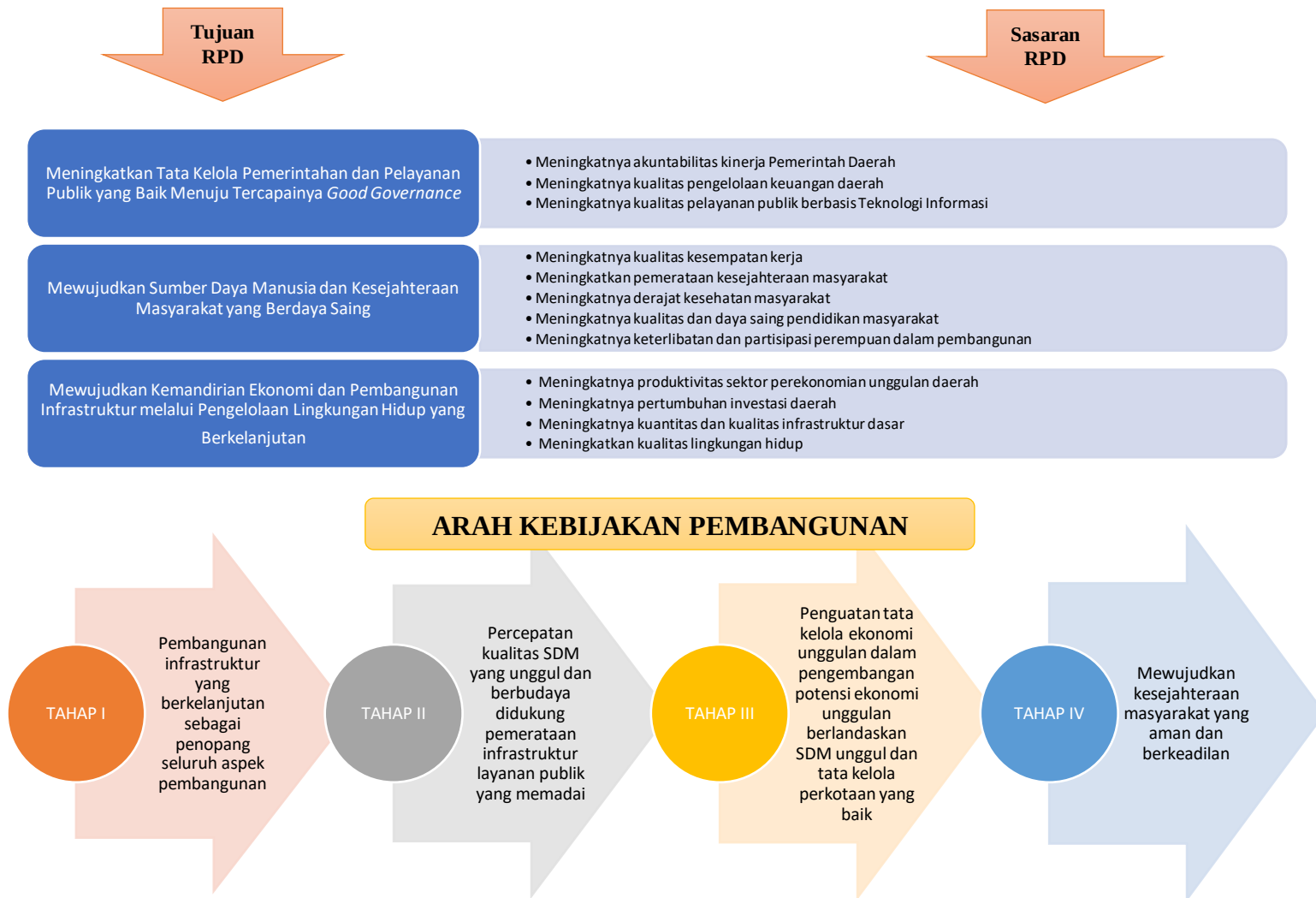
2.2. Gambaran Umum Riset dan Inovasi Daerah

Gambaran umum riset dan inovasi daerah merujuk pada bagaimana daerah tertentu, seperti Kota Pangkal Pinang, mengelola dan mengembangkan kegiatan riset serta inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menyelesaikan permasalahan lokal. Riset dan inovasi Kota Pangkal Pinang diselenggarakan oleh BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang sebagai perwujudan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Kota Pangkal Pinang. Hal ini merupakan perwujudan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah pasal 2 ayat (2) bahwa riset dan inovasi di daerah pada pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota.



BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang menjalankan fungsi riset dan inovasi berdasarkan skema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Riset dan inovasi BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang dibagi berdasarkan bidang urusan untuk mempermudah menyusun riset inovasi yang lebih terintegrasi. Kemudian integrasi riset dan inovasi antar perangkat daerah dalam satu urusan diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam mencapai target sasaran.

Beberapa aspek penting yang mencakup gambaran umum riset dan inovasi di sebuah daerah: 1) **Kebijakan dan strategi riset dan inovasi**, dimana pemerintah daerah memiliki kebijakan atau regulasi terkait riset dan inovasi yang bertujuan untuk mendorong pengembangan ilmiah dan teknologi; 2) **Strategi**, merupakan pengembangan jangka panjang yang melibatkan perencanaan riset, prioritas bidang inovasi, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah pusat; 3) **Pendanaan dan sumber daya**, melalui program hibah dari pemerintah, dana penelitian dari lembaga swasta, dan investasi dari sektor industri adalah beberapa sumber pendanaan untuk riset dan inovasi, sedangkan dari sisi sumber daya manusia dilihat dari ketersediaan tenaga ahli, peneliti, dan inovator yang berkualitas; 4) **Kolaborasi & kemitraan**, kerjasama antara pemerintah daerah, kemitraan nasional dan internasional, universitas dan industri lokal untuk melaksanakan proyek-proyek riset dan inovasi.



Gambar 2.20 Cascading Riset dan Inovasi Kota Pangkal Pinang

Sumber: Data diolah, 2024



Implementasi hasil riset dan inovasi merupakan sasaran dan indikator utama BAPPERIDA dalam rangka melaksanakan kebijakan secara efektif dalam mencapai target pembangunan daerah. Dalam melaksanakan program tersebut BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang memiliki dukungan personalia yang cukup memadai, hal ini terlihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Jumlah Personalia Menurut Jabatan di BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang

No	Jabatan	Jumlah Personil
1	Perencana	8
2	Peneliti	1
3	Analisis Perencana	3
4	Analisis Sosial Budaya	1
5	Analisis Program Pembangunan	1
6	Analisis Pengembangan Wilayah	1
7	Penyusun Rencana Lainnya	1
8	Pranata Komputer	1
9	Pengolah Data	3
10	Pengelola Keuangan	2
Total		22

Sumber: Bapperida Kota Pangkal Pinang, 2024

Tercatat struktur personil ini terdiri dari 22 orang yang mengemban tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing. Jabatan dengan jumlah personil terbanyak adalah perencana sebanyak 8 orang, diikuti oleh analisis perencana dan pengolah data, masing-masing sebanyak 3 orang. Jabatan lain seperti peneliti, analisis sosial budaya, analisis program pembangunan, analisis pengembangan wilayah, penyusun rencana lainnya, dan pranata komputer masing-masing diisi oleh 1 personil, sementara pengelola keuangan memiliki 2 personil. Kombinasi ini mencerminkan pembagian peran yang seimbang untuk mendukung perencanaan, analisis, pengelolaan data, serta keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas dengan optimal.



**Tabel 2.14 Capaian Kinerja BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIN KINERJA (%)
1	Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Berdasarkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan			
	a. Dokumen hasil laporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pangkal Pinang	1 laporan	1 laporan	100
	b. Jenis data elektronik tentang ekonomi sosial dan budaya di Kota Pangkal Pinang yang tersedia	1 laporan	1 laporan	100
	c. Forum kerjasama yang diikuti	1 laporan	1 laporan	100
	d. Media elektronik perangkat daerah yang terkelola	1 laporan	1 laporan	100
	e. Dokumen hasil laporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1 laporan	1 laporan	100
	f. Dokumen data perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 laporan	1 laporan	100
	g. Dokumen laporan RPJMD	1 laporan	1 laporan	100
	h. Dokumen masterplan kawasan	1 laporan	1 laporan	100
	i. Jumlah dokumen jurnal penelitian daerah yang tersusun	1 laporan	1 laporan	100
	j. Jumlah fasilitas sistem inovasi daerah yang di akomodir	1 laporan	1 laporan	100
	k. Jumlah dokumen hasil penelitian dan bidang aspek-aspek sosial	1 laporan	1 laporan	100
	l. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan tenaga kerja	1 laporan	1 laporan	100
	m. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1 laporan	1 laporan	100
	n. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian	1 laporan	1 laporan	100



No	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIN KINERJA (%)
	o. Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 laporan	1 laporan	100
	p. Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	1 laporan	1 laporan	100
	q. Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1 laporan	1 laporan	100
	r. Jumlah laporan pelaksanaan fasilitas hak kekayaan intelektual	1 laporan	1 laporan	100
	s. Jumlah kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	1 laporan	1 laporan	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
	a. Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan	1 laporan	1 laporan	100
	b. Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1 laporan	1 laporan	100
	c. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	1 laporan	1 laporan	100
	d. Laporan monev, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan	1 laporan	1 laporan	100
	e. Dokumen laporan evaluasi rencana kerja OPD dalam setiap triwulan	1 laporan	1 laporan	100
	f. Dokumen hasil laporan evaluasi penggunaan dana DAK	1 laporan	1 laporan	100

Sumber: Renstra Bapperida Kota Pangkal Pinang 2024-2026

Berdasarkan Rencana Strategis Bapperida Kota Pangkal Pinang terlihat bahwa capaian kinerja Kota Pangkal Pinang yang memiliki keterkaitan dengan riset dan inovasi daerah berupa capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berupa penyusunan



dokumen hasil penelitian dan inovasi daerah termasuk publikasi serta dokumen-dokumen hasil evaluasi. Semua target dokumen yang di rencanakan tercapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa Bapperida Kota Pangkal Pinang menyadari pentingnya dokumen dalam perencanaan dan pembangunan daerah berbasisi penelitian, inovasi dan bukti.



2.3. Tema Prioritas

Tema prioritas riset dan inovasi daerah ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan spesifik dan potensi unggulan masing-masing daerah. Selain itu juga memperhatikan potensi lokal, tantangan yang dihadapi, dan arah pembangunan daerah. Kota Pangkal Pinang menetapkan tema prioritasnya adalah ***Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan dengan Pengambilan Kebijakan yang Berdasarkan Evidence untuk Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia.***

Tema ini mencakup beberapa aspek kunci yang saling terkait sebagai berikut:

- 1. Pembangunan ekonomi biru,** yaitu fokus dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan sektor perikanan dan pemanfaatan hasil olahan ikan sebagai produk unggulan daerah pembangunan ekonomi biru dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang dengan pelestarian lingkungan laut. Produk potensi lokal yang dapat dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi biru diantaranya peningkatan kapasitas dan kualitas hasil olahan laut seperti otak-otak, kerupuk, keretek, kemplang, dan kricu.
- 2. Penguatan sektor pariwisata yang berkelanjutan,** didukung oleh ekonomi kreatif dan budaya lokal. Penguatan sektor pariwisata merupakan



strategi yang efektif untuk mempromosikan pertumbuhan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan pengembangan kuliner dan budaya. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek yang mampu menciptakan pengalaman wisata yang unik dan berkelanjutan, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif di Kota Pangkal Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki potensi besar untuk berkembang. Ekonomi kreatif yang di usung adalah pada bidang kuliner seperti peningkatan kapasitas dan kualitas ekonomi kreatif berbasis ekonomi kreatif kuliner seperti, otak-otak, mie Bangka, lempah kuning, rusep, dan lempah darat. Sedangkan ekonomi kreatif pada bidang kerajinan seperti peningkatan kapasitas cinderamata yang memanfaatkan potensi lokal dan ciri khas daerah, kain cual, batik cual dan rajutan.

3. Pengembangan infrastruktur dalam penguatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur memainkan peran krusial dalam penguatan daya saing SDM di Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Infrastruktur yang baik dapat mendukung pengembangan SDM dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Beberapa aspek penting dari pengembangan infrastruktur dan dampaknya terhadap daya saing SDM di Kota Pangkal Pinang seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi umum, meningkatkan mobilitas warga dan mempermudah akses ke berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini memungkinkan SDM untuk lebih mudah mencapai tempat kerja dan sumber belajar. Selain itu, perlu dikuatkan pembangunan pusat pelatihan dan inkubator bisnis guna mendorong pengembangan keterampilan praktis dan kewirausahaan, yang dapat meningkatkan daya saing SDM lokal. Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang saling memiliki keterkaitan sehingga di perlukan upaya dalam peningkatan kualitas



kesehatan dengan pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan klinik dengan fasilitas modern, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan karena dengan kesehatan yang baik mendukung produktivitas dan kualitas kerja SDM. Ketika pendidikan dan kesehatan telah diperkuat pengembangan selanjutnya adalah pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), melalui peningkatan infrastruktur TIK, seperti jaringan internet cepat dan pusat data, memperluas akses ke informasi dan teknologi dengan infrastruktur digital yang baik mendukung pengembangan keterampilan digital dan mempermudah akses ke *platform e-learning* dan aplikasi bisnis. Hal penting lainnya dalam penguatan daya saing SDM adalah peningkatan kualitas lingkungan, tempat tinggal dan perumahan, seperti pengembangan perumahan yang layak dan lingkungan yang bersih dan aman meningkatkan kualitas hidup, yang pada gilirannya berdampak positif pada kesehatan dan produktivitas SDM.

4. Mengintegrasikan umpan balik dari masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Dengan mendengarkan suara masyarakat, kebijakan dapat dirancang secara inklusif dan berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Melalui riset dan inovasi yang terencana, kebijakan ini mampu mendukung pembangunan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada efisiensi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, sedangkan ekonomi biru berorientasi pada optimalisasi potensi kelautan dan perairan secara berkelanjutan. Keduanya memerlukan pendekatan berbasis data untuk pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan inklusif. Selain itu, riset dan inovasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing SDM. Dengan fokus pada pengembangan kemampuan teknis, keterampilan adaptif, dan inovasi lokal, SDM yang berdaya saing dapat mendorong terciptanya lingkungan yang produktif dan kreatif. Kebijakan



berbasis bukti ini memberikan arah yang jelas dalam menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kapasitas SDM. Dengan tema prioritas "Riset dan Inovasi untuk Pembangunan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan," pendekatan ini mendukung upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha akan mempercepat terwujudnya ekosistem pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.



BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan kualitas hidup suatu wilayah secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan infrastruktur fisik dan sosial, mendistribusikan pembangunan secara merata antar wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, pembangunan daerah juga mencakup pengembangan sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Di luar aspek fisik dan ekonomi, pembangunan daerah juga melibatkan peningkatan akses dan kualitas layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebudayaan, dan keamanan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.

Perkembangan perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2023 berdasarkan nilai PDRB menurut lapangan usaha ditopang oleh perdagangan besar dan eceran dan industri pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 25,16% dan 17,51% (Badan Pusat Statistik, 2024). Sebagai ibu kota provinsi, Pangkal Pinang merupakan pusat perdagangan pada wilayah Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkal Pinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kota Pangkal Pinang. Sehingga wajar apabila lapangan usaha perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kota Pangkal Pinang.



Peran riset dan inovasi sangat krusial dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Riset dan inovasi berpotensi menghasilkan solusi baru, teknologi yang lebih efisien, serta produk atau layanan yang inovatif. Hal ini dapat menciptakan dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis pengetahuan dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui riset, daerah dapat mengidentifikasi peluang ekonomi potensial, menganalisis kebutuhan pasar, dan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi yang tepat. Riset juga memungkinkan daerah memahami perubahan tren pasar, memprediksi perkembangan masa depan, dan merumuskan kebijakan yang relevan. Data dan analisis dari riset dapat membantu pemangku kepentingan lokal dalam membuat keputusan dan kebijakan kearah yang lebih baik. Kemudian dengan adanya inovasi, maka penerapan ide-ide baru, teknologi baru, atau metode baru dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran produk atau layanan dapat memaksimalkan hasil. Inovasi juga dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah. Dengan mengadopsi inovasi daerah dapat meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Riset dan inovasi juga dapat menciptakan peluang bagi sektor ekonomi lokal untuk beralih ke sektor yang lebih maju dan berdaya saing, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, atau industri kreatif. Dalam era globalisasi dan transformasi digital, daerah yang mampu berinovasi dapat meraih keuntungan kompetitif yang signifikan.



3.1. Tantangan

Kota Pangkal Pinang menghadapi beberapa tantangan dalam mengoptimalkan percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:



3.1.1. Keterbatasan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pengembangan riset dan inovasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam bidang ilmiah dan teknis. Namun, daerah sering menghadapi tantangan berupa kesenjangan keterampilan dan keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan untuk riset dan inovasi. Kondisi ini menjadikan adanya keterbatasan daya saing sumber daya manusia. Sama halnya dengan daerah lain, keterbatasan daya saing SDM di Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi. Masalah ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari pendidikan, infrastruktur, budaya, hingga kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Pendidikan yang berkualitas merupakan pondasi penting dalam menciptakan SDM yang kompetitif. Namun, di Kota Pangkal Pinang, akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu masih terbatas. Selain itu, fasilitas pendidikan yang ada, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sumber daya pembelajaran lainnya, sering kali tidak memadai untuk mendukung pendidikan yang berbasis riset. Kekurangan ini menyebabkan lulusan dari institusi pendidikan lokal kurang siap untuk berpartisipasi dalam riset dan inovasi yang membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi.

Fasilitas penelitian dan infrastruktur yang memadai juga sangat penting untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi untuk mengembangkan ide-ide baru dan melakukan eksperimen yang diperlukan. Selain itu, akses terhadap teknologi modern juga masih rendah. Banyak institusi pendidikan dan perusahaan yang belum memiliki akses ke perangkat lunak, peralatan, dan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung proses riset dan pengembangan. Keterbatasan



ini menghambat kemampuan SDM untuk melakukan riset yang kompetitif dan inovatif.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mengoptimalkan pengembangan riset dan inovasi daerah. Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, industri, dan masyarakat menciptakan ekosistem yang mendukung aliran ide, sumber daya, dan keahlian yang dibutuhkan untuk riset dan inovasi. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan pendanaan yang kondusif, sementara institusi pendidikan dan penelitian dapat fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Industri berperan dalam mengkomersialisasikan hasil riset, serta memberikan umpan balik praktis dan kebutuhan pasar. Kolaborasi yang erat ini memastikan bahwa riset dan inovasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, relevan, dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.



3.1.2. Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Tantangan keterbatasan sumber daya finansial menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi. Kegiatan riset dan inovasi memerlukan investasi yang signifikan dalam hal infrastruktur, peralatan, sumber daya manusia, dan pendanaan kegiatan inovasi dan riset. Di banyak daerah, terutama di daerah yang berkembang, sumber daya finansial yang terbatas menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial yang memadai untuk kegiatan riset dan inovasi. Pemerintah daerah dihadapkan pada anggaran terbatas, yang membuat mereka harus memprioritaskan alokasi dana untuk sektor-sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini menyebabkan risiko terjadinya *underinvestment* dalam riset dan inovasi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan daya saing daerah. Selain itu, sektor swasta mungkin juga



enggan untuk berinvestasi dalam riset dan inovasi karena pertimbangan risiko dan pengembalian investasi yang kurang jelas dalam jangka pendek. Keterbatasan sumber daya finansial juga berdampak pada ketersediaan infrastruktur penelitian dan fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan laboratorium, pusat riset, dan perangkat teknologi canggih membutuhkan biaya yang besar, yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Hal ini menghambat akses masyarakat dan lembaga riset lokal terhadap fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi dan inovasi yang berdampak. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan untuk menciptakan model pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi proyek riset dan inovasi daerah.



3.1.3. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas

Infrastruktur teknologi yang terbatas menjadi hambatan signifikan dalam mengoptimalkan percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi. Kurangnya akses ke infrastruktur teknologi yang memadai, seperti koneksi internet yang cepat dan stabil, perangkat keras yang canggih, dan perangkat lunak yang mutakhir, dapat menghambat kemampuan institusi riset dan inovasi dalam melakukan kegiatan mereka secara efektif. Institusi pendidikan, laboratorium riset, dan perusahaan teknologi daerah mungkin tidak memiliki akses ke peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan inovatif. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan pengumpulan data, analisis, dan pengujian, yang pada akhirnya membatasi potensi riset dan inovasi daerah.

Selain itu, infrastruktur teknologi yang terbatas juga dapat menghambat akses masyarakat daerah terhadap informasi, pengetahuan, dan peluang yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Kurangnya aksesibilitas internet yang luas



dapat mengurangi kemampuan individu untuk mengakses sumber daya pendidikan dan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang ilmiah dan teknis. Ini dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan antara daerah dan pusat-pusat riset dan inovasi global, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing daerah dalam pasar kerja yang semakin terintegrasi secara global. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur teknologi yang mutakhir menjadi krusial untuk memastikan bahwa daerah memiliki fondasi yang kuat untuk mengoptimalkan potensi riset dan inovasi mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



3.1.4. Kesadaran dan Budaya Inovasi yang Rendah

Kesadaran akan pentingnya inovasi juga merupakan hal penting dalam mendorong percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi. Inovasi memungkinkan terciptanya produk dan layanan baru, peningkatan efisiensi produksi, dan pengembangan sektor ekonomi yang beragam, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, inovasi memperkuat daya saing daerah dengan memberikan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar global. Dengan membangun budaya inovasi yang mendorong kreativitas dan pembelajaran, daerah dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



3.1.5. Kurangnya Kolaborasi dan Kerjasama antar Pemangku Kepentingan

Tanpa kerjasama yang erat antara pemerintah, institusi pendidikan, industri, dan masyarakat, upaya untuk mengembangkan riset dan inovasi bisa menjadi tidak efisien. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam program-program riset dan



inovasi, pemborosan sumber daya, dan ketidakjelasan dalam alokasi anggaran. Selain itu, kurangnya kerjasama dapat menghambat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antar pemangku kepentingan, yang sangat penting untuk mempercepat proses inovasi dan menghindari duplikasi upaya.

Selain itu, kurangnya kolaborasi juga dapat menghambat pengembangan ekosistem inovasi yang kuat di daerah tersebut. Kerjasama yang erat antara sektor publik, swasta, dan akademis diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inovasi. Tanpa kerjasama yang baik dan kurangnya kolaborasi juga dapat mengurangi motivasi individu dan organisasi untuk berinovasi, karena kurangnya dukungan dan apresiasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, membangun kerjasama yang kokoh dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa upaya riset dan inovasi di daerah tersebut dapat berhasil dan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



3.2. Peluang

Percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi idealnya menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan daya saing sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi yang terbatas, kesadaran dan budaya inovasi yang rendah serta kurangnya kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Meskipun tantangan ini hadir, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya.



3.2.1. Sumber Daya Manusia

Kota Pangkal Pinang memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi melalui sumber daya manusia yang tersedia. Dengan populasi yang terus berkembang, terdapat banyak individu berbakat dan berpotensi yang dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan riset dan inovasi. Pendidikan yang semakin berkembang di kota ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang ilmiah dan teknis. Selain itu, adanya lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas dan politeknik, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah daerah dan sektor swasta, sumber daya manusia di Kota Pangkal Pinang memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui riset dan inovasi. Selain itu, adanya budaya lokal yang inklusif dan keramahan masyarakat Kota Pangkal Pinang juga menjadi modal berharga dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang kokoh. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat sipil, dapat terbentuk dengan lebih mudah karena adanya sikap terbuka dan kerjasama yang kuat di antara mereka. Potensi kolaborasi ini dapat mempercepat transfer pengetahuan, pertukaran ide, dan pengembangan proyek bersama dalam bidang riset dan inovasi. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan membangun ekosistem yang mendukung, Kota Pangkal Pinang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat inovasi di wilayahnya, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.



3.2.2. Kerjasama Kemitraan dalam Menghasilkan Pendanaan Alternatif

Kerjasama kemitraan merupakan salah satu peluang penting dalam menghasilkan pendanaan alternatif di Kota Pangkal Pinang untuk mengoptimalkan percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi. Dengan membangun kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, Kota Pangkal Pinang dapat mengakses sumber dana yang lebih beragam dan berkelanjutan. Misalnya, dengan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lokal atau investor swasta, proyek riset dan inovasi di kota ini dapat mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar, baik dalam bentuk pinjaman, modal ventura, atau investasi langsung. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan dan penelitian juga dapat membuka pintu untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber seperti hibah penelitian, beasiswa, atau program dukungan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Selain sebagai sumber pendanaan, kerjasama kemitraan juga dapat membawa manfaat lain dalam mengoptimalkan percepatan ekonomi daerah berbasis riset dan inovasi di Kota Pangkal Pinang. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan dan implementasi dari kegiatan riset dan inovasi, kemitraan juga dapat memperluas jaringan, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan kualitas hasil yang dihasilkan. Selain itu, kemitraan juga dapat membawa perspektif dan pengetahuan baru, serta mempromosikan pertukaran ide dan pengalaman antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, kerjasama kemitraan tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendanaan alternatif yang pada akhirnya digunakan untuk peningkatan sarana, infrastruktur maupun teknologi, tetapi juga membuka peluang untuk menghasilkan solusi inovatif dan berkelanjutan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.



BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DIDAEARAH

Ekosistem riset dan inovasi di daerah merupakan keterhubungan berbagai elemen yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di tingkat lokal (Pasal 1 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Pada intinya, ekosistem ini adalah interaksi antar unsur yang saling mendukung terwujudnya riset dan inovasi di daerah. Melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kualitas dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah. Dengan terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang baik, pemerintah berharap kualitas kebijakan dan pelayanan publik dapat meningkat, didukung oleh hasil riset dan inovasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, khususnya melalui penerapan inovasi teknologi.

Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 menetapkan bahwa ekosistem riset dan inovasi di daerah terdiri dari beberapa elemen, yaitu: (1) Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah; (2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah; (3) Kemitraan riset dan inovasi daerah; (4) Budaya riset dan inovasi daerah; (5) Keterpaduan riset dan inovasi daerah; dan (6) Penyesuaian dengan perkembangan global. Untuk itu, analisis kesenjangan dibutuhkan guna membandingkan standar ekosistem yang direkomendasikan BRIN dengan kondisi saat ini. Analisis ini dapat membantu pemerintah daerah, melalui BAPPERIDA Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), dalam meningkatkan dan mengembangkan ekosistem yang ada.

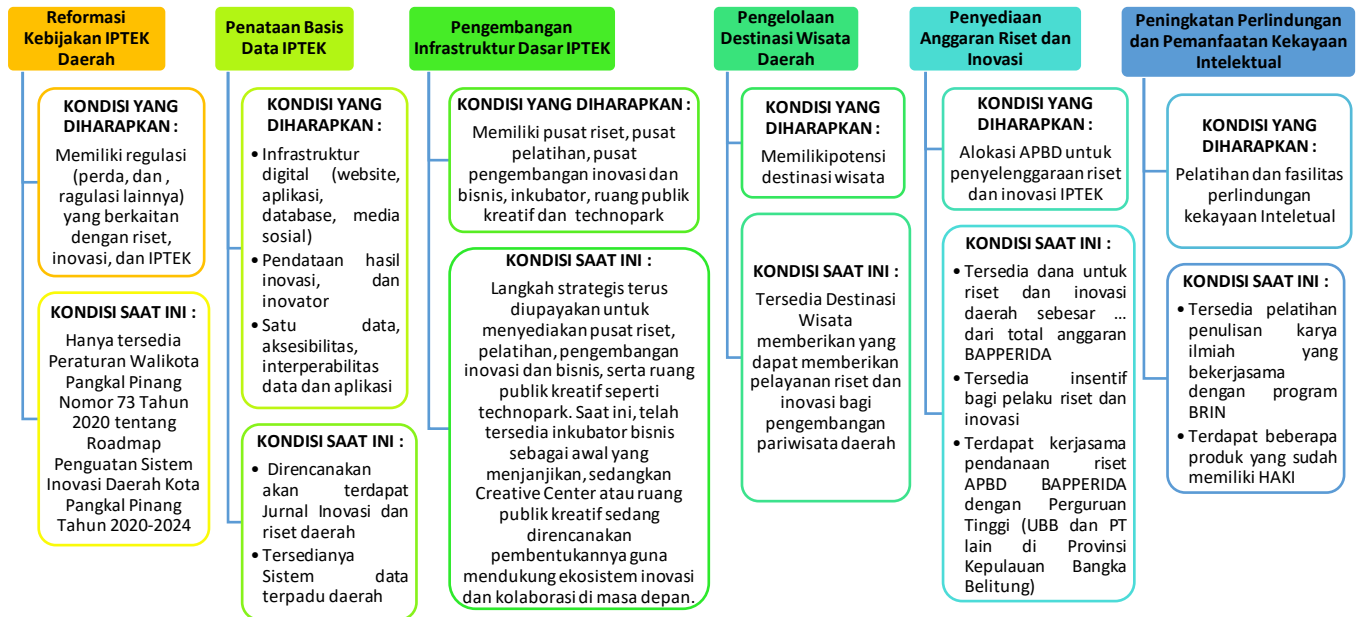


4.1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Elemen pertama dalam analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah berdasarkan Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 adalah kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi. Elemen ini menjadi dasar yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memasukkan pengembangan ekosistem riset dan inovasi ke dalam agenda kebijakan mereka. Selain itu, elemen ini mencakup ketersediaan infrastruktur dan upaya pemerintah daerah untuk melengkapinya melalui kebijakan yang ada. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah menjadi pilar utama dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi. Ada 6 indikator terkait kebijakan dan infrastruktur yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara standar ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan dengan kondisi yang ada (rill) saat ini di daerah. Terdapat instrumen kebijakan pemajuan IPTEK di Kota Pangkal Pinang sebagai berikut.

- (1) Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020-2024
- (2) SE Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang

Berikut gambar yang menggambarkan kesenjangan kebijakan dan infrastruktur IPTEK Kota Pangkal Pinang.



Gambar 4.1 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Sumber: Data Diolah, 2024



4.2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Pertumbuhan ekosistem riset dan inovasi di daerah bergantung pada kapasitas kelembagaan serta daya dukungnya. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung ini mencakup sistem dan mekanisme interaksi antara organisasi dengan lingkungannya, yang diatur melalui aturan-aturan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset dan inovasi. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset di daerah ini diukur dengan dua indikator utama yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2 Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Sumber: Data Diolah, 2024

Kolaborasi riset dan inovasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemajuan IPTEK daerah Kota Pangkal Pinang secara umum berjalan dengan baik. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat (BRIN), perguruan tinggi, hingga pelaku usaha. Kolaborasi pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan pemangku kepentingan diantaranya melalui penelitian bersama. Selain itu, keberadaan sarana pendukung riset dan inovasi IPTEK berperan penting dalam mendorong ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik. Kota Pangkal Pinang telah memiliki perpustakaan, jaringan internet yang menjangkau sampai kelurahan dan perlu memiliki memiliki kawasan *technopark* yang mampu menjadi ruang terpadu riset dan menghasilkan inovasi yang implementatif, berkelanjutan, serta sesuai kebutuhan dan arah pembangunan.



4.3. Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah

Elemen ketiga dalam analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah yaitu kemitraan riset dan inovasi daerah. Ekosistem riset dan inovasi di daerah terbentuk dengan adanya kemitraan yang kuat dan sinergis antar perangkat daerah. Sebagai pusat riset dan inovasi daerah, BAPPERIDA perlu menjalin kerjasama dengan perangkat daerah yang bertugas sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil riset dan inovasi. Dalam aspek kemitraan ini, terdapat tiga indikator utama untuk membangun kemitraan riset dan inovasi yang kokoh di daerah yaitu sebagai berikut:



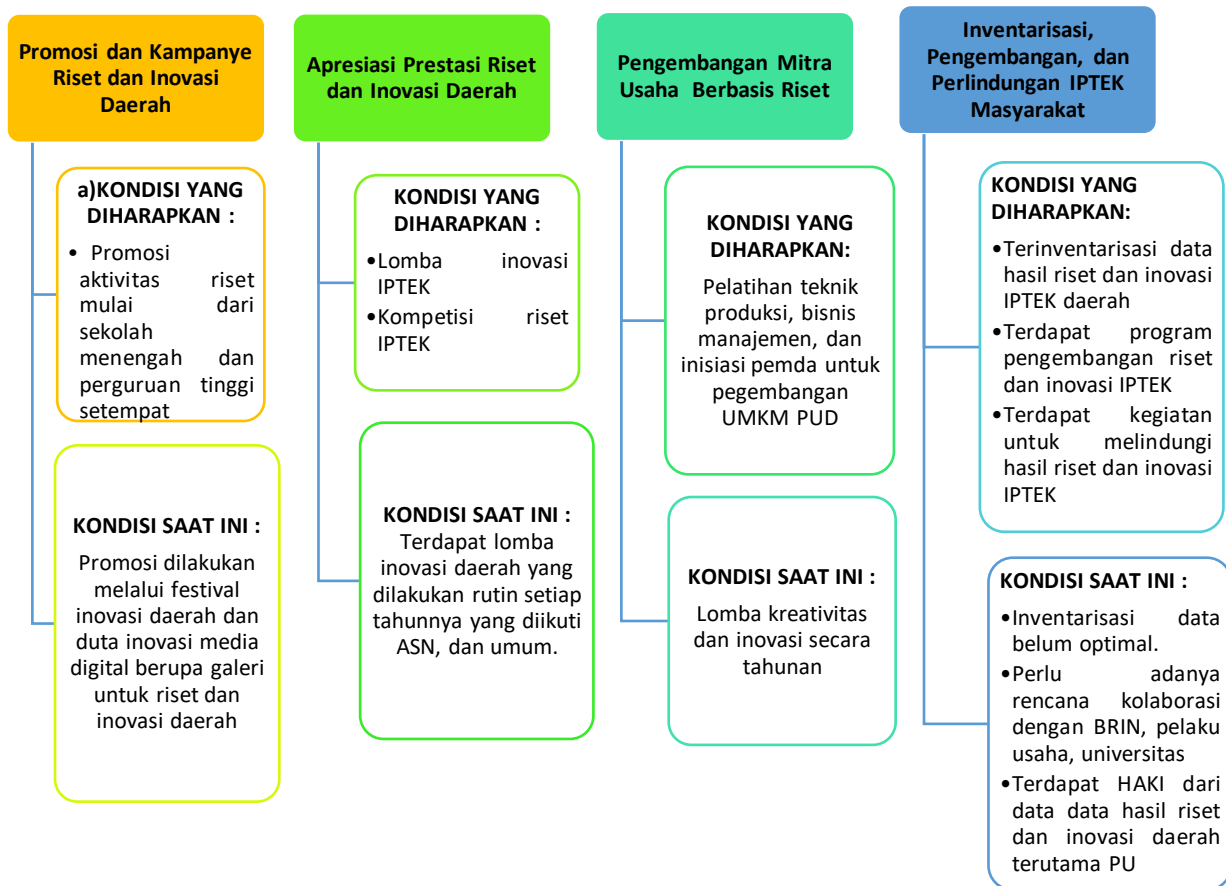
Gambar 4.3 Analisis Kemitraan Riset dan Inovasi Kota Pangkal Pinang

Sumber: Data Diolah, 2024



4.4. Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Budaya riset dan inovasi di daerah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem riset dan inovasi. Seperti halnya budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, budaya riset dan inovasi juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai ekosistem riset yang meluas di masyarakat dan diteruskan secara berkelanjutan. Untuk membangun budaya ini, beberapa indikator penting meliputi promosi dan kampanye inovasi, penghargaan atas prestasi inovatif, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, serta pendataan, pengembangan, dan perlindungan terhadap pengetahuan dan teknologi masyarakat.



Gambar 4.4 Analisis Budaya Riset dan Inovasi Daerah

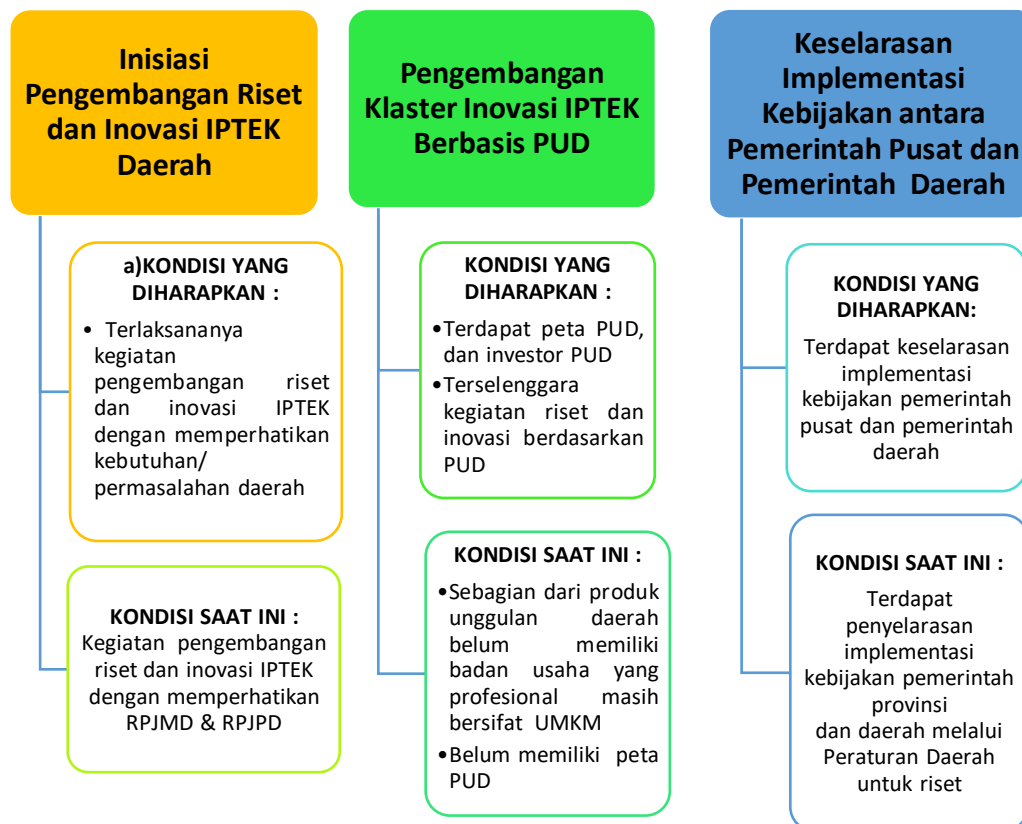
Kota Pangkal Pinang

Sumber: Data Diolah, 2024



4.5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Riset dan inovasi yang optimal adalah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, berfokus pada produk unggulan daerah, serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan lokal. Elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa kegiatan riset dan inovasi telah sesuai dengan kondisi spesifik daerah. Sumber daya seperti infrastruktur dan fasilitas pendukung akan lebih efektif jika diarahkan sesuai kebutuhan, tantangan, dan potensi unggulan daerah. Ekosistem riset dan inovasi tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui solusi yang relevan bagi permasalahan daerah.



Gambar 4.5 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang

Sumber: Data Diolah, 2024



4.6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Pada tahap akhir, ekosistem riset dan inovasi di daerah perlu mempertimbangkan isu-isu internasional yang mungkin berdampak pada kondisi lokal. Keterhubungan dengan perkembangan global penting tidak hanya untuk mengantisipasi potensi krisis, tetapi juga untuk memperkaya kerangka riset dan inovasi dengan pendekatan terbaru. Ini mencakup adopsi teknologi modern dan metode ilmiah yang berkembang. Mempertimbangkan elemen keselarasan dengan tren global akan memberikan perspektif yang lebih luas, sehingga riset dan inovasi di daerah dapat dilakukan dengan wawasan yang lebih mendalam dan relevan



Gambar 4.6 Analisis Kesenjangan Penyelarasan dengan Perkembangan Global Kota Pangkal Pinang

Sumber: Data Diolah, 2024



BAB V

STRATEGI DAN INOVASI DAERAH

Dalam pengembangan riset dan inovasi daerah, pemerintah daerah perlu menentukan strategi riset dan inovasi daerah yang didasarkan pada kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah Kota Pangkal Pinang. Strategi yang disusun harus sejalan dengan analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Strategi diharapkan dapat memperkuat serta mengidentifikasi kebutuhan agar ekosistem riset dan inovasi daerah menjadi lebih baik. Secara lengkap, strategi riset dan inovasi IPTEK daerah Kota Pangkal Pinang sebagai berikut.



5.1. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Dalam pengembangan riset dan inovasi daerah, Kota Pangkal Pinang memerlukan beberapa kebijakan dan infrastruktur. Terdapat beberapa dasar hukum dalam pengembangan riset dan inovasi daerah di Kota Pangkal Pinang. Seperti telah dilakukannya MoU dengan Universitas Bangka Belitung dengan implementasi beberapa kajian, penyusunan RPJMD dan publikasi hasil riset pada jurnal nasional terakreditasi. Keberadaan sumberdaya manusia dengan kompetensi sebagai peneliti harus terakomodir pada BAPPERIDA, mengingat kedepannya harus membentuk pusat riset dan pengembangan inovasi daerah.

Perlu adanya pembangunan infrastruktur yang signifikan untuk pengembangan riset dan inovasi tersebut daerah. Proses perencanaan dan pengembangan infrastruktur penelitian dan inovasi harus melalui analisis mendalam dan penyesuaian terhadap potensi serta permasalahan yang terdapat pada Kota Pangkal Pinang. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya infrastruktur yang sudah ada dalam upaya menunjang penelitian dan inovasi daerah. Berikut tabel strategi kebijakan dan infrastruktur IPTEK daerah Kota Pangkal Pinang.



**Tabel 5.1 Strategi Kebijakan dan Infrastruktur IPTEK Daerah
Kota Pangkal Pinang**

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Reformasi kebijakan IPTEK daerah	Hanya terdapat perda dan surat walikota namun belum ada regulasi lainnya yang terkait riset, inovasi, dan IPTEK	Penyusunan rencana induk dan peta jalan inovasi daerah
2	Penataan basis data IPTEK	a. Belum memiliki infrastruktur digital (website, aplikasi, database, media sosial) b. Belum terdapat pendataan Hasil inovasi, dan inovator c. Belum terbentuknya satu data, aksesibilitas, interoperabilitas data dan aplikasi	Pengembangan data iptek berbasis digitalisasi dan satu data
3	Pengembangan infrastruktur dasar IPTEK	Belum memiliki pusat riset, pusat pelatihan, pusat pengembangan inovasi dan bisnis, inkubator, serta ruang publik kreatif	Pembangunan pusat-pusat riset dan inovasi daerah
4	Pengelolaan destinasi wisata daerah	Memiliki potensi destinasi wisata namun belum optimal dalam pengelolaannya	Mengoptimalkan tata kelola destinasi wisata unggulan, dengan pemberdayaan riset, inovasi, pokdarwis dan pemberdayaan masyarakat dengan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja sektor pariwisata.
5	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi APBD untuk penyelenggaraan riset dan inovasi IPTEK masih belum maksimal	a. Peningkatan anggaran riset yang tidak hanya berfokus pada sumber APBD, namun juga dengan sumber pendanaan lain seperti hibah yang di adakan oleh beberapa kementerian b. Penyediaan anggaran insentif bagi peneliti dan



No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
			inovator daerah
6	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum adanya pelatihan dan fasilitas perlindungan Kekayaan intelektual	Pengajuan HAKI PUD kelitbangan

Sumber: Data diolah, 2024



5.2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi tidak hanya dilakukan oleh BAPPERIDA, namun perlu adanya kerjasama dengan akademisi, OPD, swasta dan masyarakat. Selain itu kerjasama nasional dan internasional pun perlu dilakukan kajian dan kerjasama. Hasil riset dan inovasi daerah yang telah dilaksanakan harus terukur dan dievaluasi untuk pengembangan pada masa yang akan datang. Berikut tabel strategi penguatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi.

Tabel 5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi IPTEK di daerah dengan pemangku kepentingan	a. Belum optimalnya kerjasama riset dengan perguruan tinggi setempat dan nasional yang telah dilaksanakan. b. Belum optimalnya kolaborasi BRIN dengan beberapa OPD terkait dengan permasalahan pembangunan daerah. c. Belum optimalnya kolaborasi BRIN dalam pengembangan dan optimalisasi destinasi wisata berbasis <i>quality</i>	Penguatan kerjasama dan kualitas riset dan inovasi daerah dengan perguruan tinggi dan badan usaha yang terdapat di daerah dalam mengembangkan IPTEK berbasis permasalahan yang terdapat di daerah, sebagai solusi pengembangan pembangunan daerah



No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
		<i>tourism</i> d. Belum adanya pembinaan dari BRIN secara periodik e. Belum ada kerjasama khusus antara BAPPERIDA dengan BRIN yang berkaitan dengan Hanya berkaitan dengan penilaian riset dan inovasi daerah	
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi IPTEK di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Belum memiliki tempat khusus untuk riset	Membangun Pusat riset dan inovasi daerah

Sumber: Data diolah, 2024



5.3. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah

Dalam pengembangan riset dan inovasi daerah tentunya memerlukan sumber daya besar. Perlu adanya kemitraan dengan memberdayakan berbagai lembaga riset, termasuk swasta, universitas, dan komunitas, yang dikoordinasikan oleh BBAPPERIDA. Kerjasama antar lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat penting dilakukan khususnya dalam hal mekanisme pendanaan bersama seperti *Matching Fund* dan Kedaireka. Hasil riset dan inovasi daerah harus diimplementasikan agar memberikan manfaat bagi daerah.

Open acces dalam implementasi hasil riset dan inovasi perlu dilakukan sehingga tersebar luas pada masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat luas dapat memanfaatkan data baik untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun penguatan sektor-sektor ekonomi daerah. Berikut tabel strategi peningkatan kemitraan riset dan inovasi IPTEK di daerah.



Tabel 5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	1. Belum optimalnya pelatihan penguatan PUD 2. Belum banyak penelitian dan kajian tentang PUD 3. Belum optimalnya pelatihan untuk UMKM	1. Kerjasama riset dengan mitra 2. Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi daerah serta adanya proses evaluasi implementasi riset 3. Membuka peluang kerjasama dengan swasta, pelaku usaha dan masyarakat sehingga tercipta sinergitas
2	Peningkatan persebaran inovasi daerah	Tidak meratanya fasilitas seperti pusat riset, inkubator bisnis, ruang kreatif publik, dan <i>technopark</i>	Mendirikan pusat riset, inkubator bisnis, ruang kreatif publik, dan <i>technopark</i>
3	Mengimplementasikan hasil riset dan inovasi IPTEK di daerah	1. Masih minimnya penelitian bertemakan PUD bekerjasama dengan Perguruan Tinggi 2. Masih kurangnya pelatihan kepada pelaku UMKM tentang digital marketing untuk penguatan PUD	1. Melakukan publikasi terbuka hasil riset dan inovasi daerah 2. Membentuk pusat inovasi daerah

Sumber: Data diolah, 2024



5.4. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Budaya riset menjadi salah satu aspek dalam mempertahankan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Perlunya penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung riset dan inovasi di daerah. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memulai budaya budaya riset dan inovasi di daerah melalui berbagai kegiatan riset, festival inovasi daerah dan berbagai kompetisi untuk memperkaya budaya riset dan inovasi daerah. Berikut tabel strategi peningkatan budaya riset dan inovasi daerah.



**Tabel 5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah
Kota Pangkal Pinang**

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Promosi dan kampanye riset dan inovasi daerah	Promosi masih belum maksimal dilakukan melalui media sosial dan penyediaan galeri riset dan inovasi daerah	Perluasan promosi riset dan inovasi daerah melalui digitalisasi
2	Apresiasi prestasi riset dan inovasi daerah	a. Lomba inovasi IPTEK belum bersifat agenda rutin tahunan b. Belum terdapat kompetisi kreativitas dan inovasi daerah	Peningkatan apresiasi hasil riset dan inovasi daerah serta membuka peluang dan kesempatan bagi tenaga kerja untuk ikut aktif dalam riset dan inovasi
3	Pengembangan mitra usaha berbasis riset	Pelatihan teknik produksi, bisnis manajemen, dan inisiasi pemda untuk pengembangan UMKM PUD	Pengembangan usaha berbadan hukum melalui pelatihan pelaku usaha PUD
4	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan IPTEK masyarakat	1. Inventarisir data hasil riset dan inovasi IPTEK daerah belum optimal 2. Belum optimal program pengembangan riset dan inovasi IPTEK 3. Belum optimal kegiatan untuk melindungi hasil riset dan inovasi IPTEK	1. Melakukan inventarisasi data secara berkala dan konsisten 2. Perlu adanya rencana kolaborasi dengan BRIN, pelaku usaha, universitas 3. Memperbanyak HAKI dari data data hasil riset dan inovasi daerah terutama PUD

Sumber: Data diolah, 2024



5.5. Strategi Peningkatan Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Produk unggulan daerah dan permasalahan daerah merupakan latar belakang dalam melakukan riset dan inovasi daerah. Karena riset dan inovasi bertujuan memberikan solusi bagi daerah berdasarkan penelitian dan kajian. Sehingga perlu adanya penguatan keterpaduan riset untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. Berikut tabel strategi peningkatan penguatan keterpaduan riset dan inovasi di daerah.



Tabel 5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi IPTEK Daerah

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Inisiasi pengembangan riset dan inovasi IPTEK daerah	Kegiatan pengembangan riset dan inovasi IPTEK belum secara maksimal diselaraskan dengan RPJMD & RPJPD	Menyelaraskan pengembangan riset dan inovasi IPTEK dengan RPJMD & RPJPD
2	Pengembangan kluster inovasi IPTEK berbasis PUD	Belum memiliki peta PUD, dan investor PUD	Pemetaan dan peningkatan kualitas PUD
3	Keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Belum optimalnya penyelarasan implementasi kebijakan pemerintah provinsi dan daerah melalui peraturan daerah untuk riset	Penyelarasan tema riset antara pusat, provinsi dengan daerah

Sumber: Data diolah, 2024



5.6. Strategi Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Tema-tema riset Kota Pangkal Pinang pada masa depan perlu mempertimbangkan isu-isu global dengan segala perubahan yang terjadi disesuaikan dengan kondisi wilayah. Pemerintah Kota Pangkal Pinang perlu menyusun kluster riset dan inovasi daerah sehingga arah riset akan terarah dan spesifik. Berikut tabel strategi penyelarasan riset dan inovasi daerah dengan pengembangan global.

Tabel 5.6 Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Pengembangan Global

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1	Peningkatan isu global terkait dengan pengembangan riset dan inovasi daerah	Belum selarasnya pengembangan riset dan inovasi daerah yang bertemakan isu global	1. Menyusun kluster riset dan inovasi daerah yang memiliki dasar hukum 2. Melakukan penguatan kerjasama dan peningkatan kualitas riset nasional dan internasional
2	Penguatan kerjasama	Belum optimalnya kerjasama riset dan	Penguatan kerjasama internasional



No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
	internasional	inovasi internasional	

Sumber: Data diolah, 2024



5.7. Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi anggaran, strategi pengembangan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di Kota Pangkal Pinang harus menjadi prioritas. Optimalisasi peta jalan untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi akan membantu program kegiatan riset dan inovasi sehingga dapat terwujud. Pencapaian hasil riset dan inovasi daerah harus terukur dengan tepat dan optimal dalam implementasi, masukan target dan indikator sasaran yang jelas. Berikut tabel strategi prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah.

Tabel 5.7 Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Elemen Ekosistem Riset Daerah	Kegiatan	Indikator
Kebijakan dan infrastruktur IPTEK	1. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset Daerah 2. Pembangunan pusat riset daerah	Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Riset Daerah
Penguatan kapasitas kelembagaan	1. Tersedianya SDM / Fungsional Peneliti 2. Insentif bagi Peneliti	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM/Fungsional Peneliti
Kemitraan riset dan inovasi	Penguatan kerjasama pemerintah daerah dengan PT setempat	MoU dengan PT Setempat
Peningkatan budaya riset dan inovasi	Pengembangan PUD berbasis riset	PUD yang dikembangkan
Keterpaduan riset dan inovasi daerah	Menyusun peraturan daerah tentang riset dan inovasi untuk mendukung PUD	Peraturan Walikota

Sumber: Data diolah, 2024



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2023. Pangkal Pinang dalam Angka Kota Pangkal Pinang dalam Angka, 2023
- Bapperida Kota Pangkal Pinang, 2024, <https://bapperida.pangkalpinangkota.go.id/>
- Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkal Pinang 2024-2026, Bappeda Kota Pangkalpinang.



LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PANGKAL PINANG**

Jl. Yos Sudarso No. 94 Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Homepage: <https://pangkalpinangkota.bps.go.id> E-mail: bps1971@bps.go.id



Nomor : B-278/19716/IF.120/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik
Sektoral

Pangkal Pinang, 26 Juli 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kota
Pangkal Pinang

di-

Pangkal Pinang

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Survei Pendahuluan Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan IPTEK Daerah Kota Pangkalpinang

Penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kota
Pangkal Pinang

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : LAYAK
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik
terlampir.

Identitas Rekomendasi : V-24.1971.002

Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar
kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pangkal Pinang,



Dewi Savitri, S.S.T., M.Si.





Lampiran II. Surat Rekomendasi Badan Riset dan Inovasi Nasional



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon: 081110646781 Surel: dit-krid@brin.go.id Laman: www.brin.go.id

Nomor : B- 1083/II.9.2/RI.00/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rekomendasi Kebijakan

Jakarta, 9 Desember 2024

Yth. Kepala Bapperida Kota Pangkalpinang
di Pangkalpinang

Dalam rangka memperkuat peran riset dan inovasi bagi pembangunan daerah, Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah melakukan Review terhadap Kajian Awal Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Di Kota Pangkalpinang. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami lampirkan rekomendasi kebijakan dari hasil Review tersebut.

Kami sangat berharap Bapperida Kota Pangkalpinang dapat memanfaatkan hasil Review tersebut sebagai materi untuk penyempurnaan Kajian Awal Renduk dan sebagai materi bagi penyusunan dokumen Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Kota Pangkalpinang. Mohon berkenan memberikan tanggapan tertulis terhadap rekomendasi kebijakan yang kami sampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kebijakan Riset dan
Inovasi Daerah,



TT ELEKTRONIK

Dr. Sri Nuryanti

Tembusan:
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (sebagai laporan).



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR-E, silakan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code



REKOMENDASI KEBIJAKAN

REVIEW KAJIAN AWAL RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DI KOTA PANGKALPINANG

Dimas Januar Rizki, S.T., M.S.Ak
Email: dima004@brin.go.id

Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie Lantai 12, Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah perlu memasukkan muatan riset dan inovasi untuk memperkuat dokumen perencanaan pembangunan, sesuai amanah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dimana Iptek berperan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Selanjutnya, dalam Pasal 15 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, disampaikan bahwa Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah merupakan dokumen perencanaan yang mengintegrasikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan riset dan inovasi serta sumber daya iptek yang dimiliki oleh seluruh unsur pemangku kepentingan riset dan inovasi di daerah. Dokumen ini perlu segera disusun dengan tahapan yang tepat sesuai dengan rekomendasi kebijakan yang kami sampaikan, agar dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan riset dan inovasi yang terintegrasi di daerah, sekaligus menjadi landasan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang telah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sesuai amanat Pasal 66 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Pembentukan Bapperida Tipe B ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Bapperida melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian Dan Pengembangan/ Riset dan Inovasi Daerah, dengan salah satu tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah adalah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah (Renduk). Renduk menjadi pedoman penyelenggaraan riset dan inovasi yang terintegrasi di daerah guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah, sekaligus menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan Renduk mengacu pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di daerah. Renduk merupakan dokumen perencanaan yang mengintegrasikan pelaksanaan program dan kegiatan riset dan inovasi serta sumber daya iptek yang dimiliki oleh seluruh unsur pemangku kepentingan riset dan inovasi di daerah. Renduk adalah dokumen yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Melalui dokumen Renduk, Bapperida dapat meningkatkan perannya dalam mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan di daerah dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi untuk pencapaian target pembangunan daerah, khususnya pada 5 tahun pertama RPJPD 2025-2045. Penguatan ekosistem riset dan inovasi perlu disusun selaras dengan arah kebijakan 5 tahun pertama (2025-2029). Di tahun 2024 Bapperida Kota Pangkalpinang telah menyelesaikan dokumen Kajian Awal Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK, yang selanjutnya akan disempurnakan menjadi dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK. Berdasarkan urgensi tersebut, maka Bapperida Kota Pangkalpinang perlu menyusun dokumen Renduk dengan periode 2025-2029, sesuai dengan periode RPJMD.

II. DESKRIPSI MASALAH

Pasal 24 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 menyatakan bahwa Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, yang meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Sehingga Renduk sebagai pedoman penyelenggaraan riset dan inovasi yang terintegrasi di daerah wajib digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Penyusunan Renduk perlu memperhatikan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang menjadi kunci penguatan pondasi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat. Serta memperhatikan Permasalahan Utama yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh daerah, melalui pemanfaatan riset dan inovasi. Penentuan Prioritas PUD dan Prioritas Permasalahan perlu dilakukan dengan analisis yang tepat dan didukung dengan data yang akurat, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

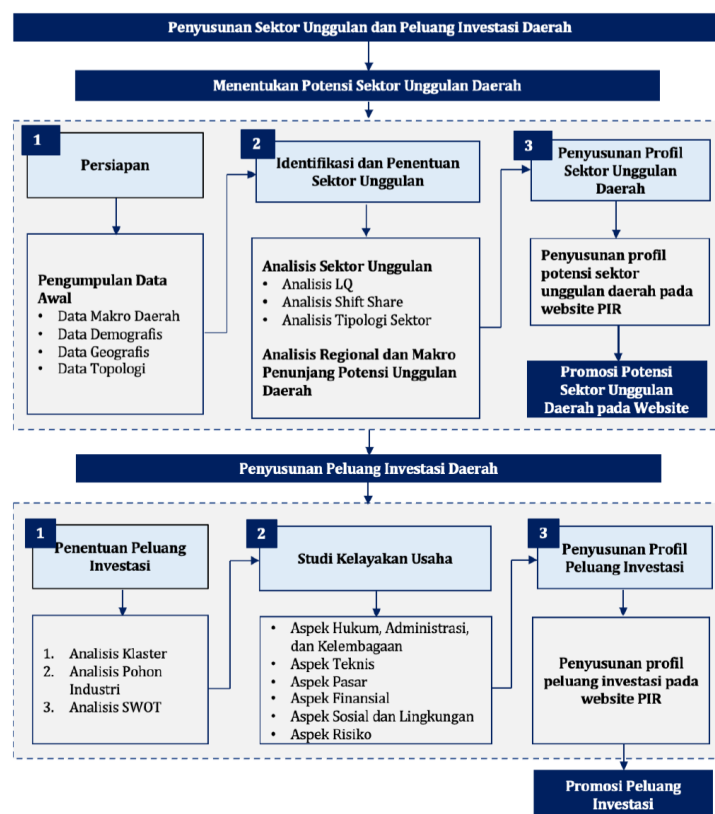
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan terbatasnya waktu penyusunan Renduk dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Bapperida dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan secara bersamaan perlu segera diatasi oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dengan melaksanakan berbagai strategi yang efektif untuk menyelesaikan penyusunan Renduk agar selaras dengan *timeline* penyusunan RPJMD.

III. ANALISIS

Renduk merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat kolaborasi pemanfaatan riset dan inovasi untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu Pangkalpinang Berkelas 2045 (Berdaya Saing, Berkelanjutan, Maju,

dan Sejahtera). Pencapaian Visi Pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan riset dan inovasi untuk meningkatkan perekonomian serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Peningkatan ekonomi daerah difokuskan pada optimalisasi potensi ekonomi dari berbagai produk yang menjadi Unggulan Daerah (PUD) secara holistik melalui upaya penguatan ekosistem riset dan inovasi.

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.



Gambar 1. Kerangka Teoritis Penentuan PUD

Sumber: SK Menteri Investasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah

Dalam menentukan Prioritas PUD, Bapperida dapat melakukan kajian ataupun memanfaatkan hasil kajian terkait yang sudah disusun oleh daerah. Bapperida Kota Pangkalpinang telah memanfaatkan hasil Kajian Potensi Dan Peluang Investasi Daerah sebagai bentuk penyelarasan kebijakan yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Investasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah. Regulasi tersebut menjelaskan mengenai penggunaan analisis sektor unggulan dengan analisis LQ, *Shift Share*, dan Tipologi Sektor, yang dilanjutkan dengan sejumlah

analisis untuk menghasilkan komoditas yang menjadi PUD melalui analisis Klaster, Pohon Industri, dan SWOT.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Bapperida Kota Pangkalpinang telah menyelenggarakan diskusi partisipatif untuk membahas, menganalisis dan menetapkan prioritas PUD, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. PUD yang disepakati sebagai prioritas adalah Produk Olahan Hasil Perikanan, Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner, Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya, Wisata Budaya Berbasis Kekhasan Lokal, dan Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk.

Hilirisasi timah dengan Pengembangan Produk dipertahankan sebagai fokus penguatan PUD untuk memastikan bahwa pengelolaan hilirisasi timah dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial. Dari aspek lingkungan, pelaku usaha hilirisasi timah didorong untuk meningkatkan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya untuk pemulihan kerusakan lingkungan. Dari aspek ekonomi, hilirisasi timah didorong melalui riset dan inovasi untuk menghasilkan skema diversifikasi produk olahan yang dapat melibatkan UMKM, sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dari aspek sosial, hilirisasi timah didorong agar mendukung pengembangan prioritas PUD lainnya yang dapat dikelola secara berkelanjutan, baik dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata.

Penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk pengembangan PUD ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan ekonomi, yang tertuang dalam dokumen Rancangan RPJPD Kota Pangkalpinang 2025-2045. Beberapa isu strategis pada tahapan pembangunan 5 tahun pertama (2025-2029) yang perlu menjadi acuan bagi pengembangan PUD adalah peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja. Hilirisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah PUD melalui proses lebih lanjut dengan mengintegrasikan produk-produk tersebut ke dalam rantai nilai yang lebih kompleks. Hilirisasi dapat diwujudkan dengan mendorong pengembangan rantai pasokan lokal sehingga dapat meningkatkan keterlibatan perusahaan lokal dan masyarakat dalam proses peningkatan ekonomi di Kota Pangkalpinang.

Pengembangan PUD pada sektor industri maritim, pariwisata, dan pertanian juga diarahkan untuk membangun pondasi yang kokoh untuk transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Inklusif berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, untuk menentukan Prioritas Permasalahan yang akan diselesaikan melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi, Bapperida perlu melakukan analisis secara tepat berdasarkan data dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang dipilih sebagai prioritas harus selaras dengan pembahasan permasalahan daerah dalam dokumen RPJPD, khususnya yang menjadi prioritas dalam tahapan 5 tahun pertama, dan permasalahan yang dibahas pada dokumen rancangan teknokratik RPJMD. Penyelarasan tersebut sangatlah penting untuk memastikan agar Renduk dapat menjawab permasalahan serta isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah, untuk memastikan program-program yang dirumuskan dalam Renduk dapat menjadi acuan bagi penyusunan rancangan RPJMD.

Selain melalui penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penentuan permasalahan juga perlu dilakukan berdasarkan data yang tepat dan analisis yang tepat. Bapperida dapat menyusun kertas kerja untuk melengkapi setiap permasalahan dengan data dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam proses skoring urutan permasalahan dan penentuan permasalahan yang prioritas. Analisis yang perlu dilakukan adalah analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, kualitas SDM, maupun lingkungan. Kemudian dilakukan analisis untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan analisis identifikasi pemangku kepentingan terkait penyelesaian permasalahan. Selanjutnya dilakukan analisis untuk melengkapi setiap permasalahan dengan data yang relevan dan referensi sumber data atau kajian atau dokumen yang digunakan.

Dengan tersusunnya data-data tersebut maka Bapperida dapat melakukan analisis prediksi terhadap solusi yang bisa diberikan terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan politik, penegakan hukum, pendekatan sosial budaya, dan penguatan birokrasi perlu diberikan catatan agar tidak menjadi permasalahan yang dijadikan prioritas dalam dokumen Renduk. Permasalahan yang perlu menjadi prioritas adalah permasalahan yang dalam penyelesaiannya perlu dilakukan dengan memperkuat ekosistem riset dan inovasi secara utuh, yang terdiri atas upaya memperkuat kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi, memperkuat kelembagaan dan daya dukung SDM, memperkuat kemitraan riset dan inovasi, memperkuat budaya inovasi di masyarakat dan perangkat daerah, memperkuat keterpaduan riset dan inovasi, serta memperkuat keselarasan dengan isu global. Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan diskusi partisipatif dalam rangka menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan atas Prioritas Permasalahan yang akan diselesaikan melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi dalam dokumen Renduk.

Terkait dengan penulisan bab, berdasarkan hasil analisis sinkronisasi kebijakan, diperoleh beberapa hasil identifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk Penulisan Bab 1, pada penjabaran Sub Bab Latar Belakang perlu menambahkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dimana Iptek berperan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Kemudian pada Sub Bab tersebut juga perlu menjelaskan mengenai telah terbentuknya Bapperida di Kota Pangkalpinang, dengan salah satu tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah adalah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah (Renduk). Dan pada Sub Bab Dasar Hukum perlu menambahkan 2 regulasi yaitu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah.
- b. Untuk Penulisan Bab 2, pada Sub Bab terakhir perlu memasukkan Judul Sub Bab Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Di Daerah Saat Ini. Pada Sub bab tersebut memuat hasil telaah terhadap Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi secara utuh berdasarkan 6 elemen Ekosistem sesuai acuan PerBRIN Nomor 5 Tahun 2023. Hasil telaah Kondisi Ekosistem dilakukan secara utuh terhadap setiap PUD yang dipilih sebagai prioritas, dan terhadap

seluruh permasalahan yang dipilih sebagai prioritas. Proses telaah dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen kertas kerja.

- c. Untuk Penulisan Bab 3, pada telaah Tantangan dan Peluang perlu melakukan identifikasi terhadap Tantangan dan Peluang yang akan dihadapi daerah dalam 5 tahun ke depan. Kemudian pada Sub Bab terakhir perlu memasukkan Judul Sub Bab Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Di Daerah yang ingin dicapai, berdasarkan hasil telaah Tantangan dan Peluang 5 tahun ke depan. Hasil telaah Kondisi Ekosistem dilakukan secara utuh terhadap setiap PUD yang dipilih sebagai prioritas, dan terhadap seluruh permasalahan yang dipilih sebagai prioritas. Proses telaah dapat dilakukan dengan melanjutkan kertas kerja yang disusun untuk mengisi Kondisi Ekosistem pada Bab 2, agar tercipta kesinambungan dan konsistensi dalam melaksanakan telaah.
- d. Untuk Penulisan Bab 4, Analisis kesenjangan perlu dilakukan untuk setiap PUD yang dipilih sebagai prioritas, dan terhadap seluruh permasalahan yang dipilih sebagai prioritas. Analisis kesenjangan dapat dilakukan dengan melanjutkan kertas kerja yang disusun untuk mengisi Kondisi Ekosistem pada Bab 2 dan 3, agar tercipta kesinambungan dan konsistensi dalam melaksanakan telaah.
- e. Untuk Penulisan Bab 5, judul bab 5 perlu diperbaiki menjadi Strategi Riset dan Inovasi Daerah. Strategi perlu dirumuskan untuk setiap PUD yang dipilih sebagai prioritas, dan terhadap seluruh permasalahan yang dipilih sebagai prioritas. Perumusan Strategi dapat dilakukan dengan melanjutkan kertas kerja yang disusun untuk mengisi Kondisi Ekosistem pada Bab 2,3 dan 4, agar tercipta kesinambungan dan konsistensi dalam penyusunan dokumen.
- f. Untuk penyempurnaan menjadi Dokumen Renduk secara utuh, perlu menambahkan Bab 6 Peta Jalan Riset dan Inovasi Di Daerah, dan Bab 7 Rencana Aksi Riset dan Inovasi Di Daerah.

Bapperida telah menyelesaikan kajian awal Renduk, sehingga untuk penyempurnaan menjadi dokumen Renduk perlu membentuk tim teknis penyusun dokumen Renduk yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian dokumen. Tim penyusun terdiri atas Bapperida, perangkat daerah lainnya, dan perguruan tinggi.

IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Bapperida telah menyelesaikan Kajian Awal Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK sampai dengan Bab 5 Strategi Riset dan Inovasi Daerah sesuai arahan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Namun Bapperida perlu segera menyempurnakan Hasil Kajian Awal menjadi Dokumen Renduk untuk periode 2025-2029 sebagai pedoman bagi penyelenggaraan riset dan inovasi yang terintegrasi di daerah, sekaligus landasan bagi penyusunan RPJMD 2025-2029. Dalam proses penyempurnaan tersebut perlu menyempurnakan penulisan dokumen sesuai penjelasan pada bab analisis di atas,
2. Bapperida perlu membentuk tim teknis penyusun Renduk, yang terdiri atas Bapperida, perangkat daerah lainnya, dan/ atau perguruan tinggi,

3. Bapperida perlu menyusun rencana kerja tim teknis penyusun Renduk, selaras dengan *timeline* penyusunan RPJMD 2025-2029, untuk memastikan agar Renduk dapat menjadi masukan bagi RPJMD,
4. Bapperida perlu berkoordinasi dengan BRIN untuk memperoleh pendampingan dalam menyusun dokumen Renduk,
5. Bapperida perlu berkoordinasi dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelaraskan dengan penyusunan Renduk Provinsi,
6. Dalam menentukan Prioritas Permasalahan, Bapperida perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai permasalahan yang dihadapi serta dilengkapi dengan data dan analisis yang tepat, yang terdiri atas analisis dampak permasalahan, analisis akar permasalahan, analisis identifikasi pemangku kepentingan terkait, dan analisis prediksi solusi atas permasalahan yang dihadapi, untuk menghasilkan penentuan prioritas permasalahan secara akurat,
7. Bapperida perlu mengkoordinasikan penyusunan Renduk melalui forum koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan riset dan inovasi di daerah, sebagai bentuk pendekatan partisipatif untuk memperoleh masukan untuk menyusun peta jalan serta menyusun program penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk pengembangan prioritas PUD dan untuk penyelesaian permasalahan prioritas,
8. Bapperida perlu melakukan telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang sedang dalam proses penyusunan yaitu RPJPD 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, baik di level provinsi maupun di level Kota Pangkalpinang untuk menyelaraskan penyusunan Renduk dengan visi, misi, arah kebijakan, dan tema prioritas pembangunan, serta keterpaduan antar kabupaten/kota dalam lingkup provinsi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bappedalitbang Kota Pangkalpinang. (2023). Kajian Potensi dan Peluang Investasi Kota Pangkalpinang
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sinas Iptek. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah. Jakarta

Pemerintah Kota Pangkalpinang. (2024). Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
Pemerintah Kota Pangkalpinang. (2024). Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045



KAJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DENGAN BAPPEDA KOTA PANGKALPINANG

Bapak/Ibu Responden yang kami hormati,

Kuesioner ini adalah bagian dari kajian ilmiah yang dilaksanakan atas kerjasama antara Universitas Bangka Belitung dengan BAPPEDA Kota Pangkalpinang. Kajian ini akan menggali informasi berkenaan dengan **Dokumen Pendahuluan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029**. Pengambilan data ini adalah bagian dari kajian yang bersifat ilmiah sehingga nama informan tidak akan disebutkan dalam laporan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dan secara umum dapat memperluas khasanah keilmuan.

Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).

BLOK I : KETERANGAN UMUM	
(1)	(2)
1. Provinsi	
2. Kabupaten/Kota *)	
3. Kecamatan	
4. Kelurahan/Desa *)	
5. Nama Responden	
6. Nomor Urut Responden	
7. Alamat:	
Jalan :	
No Telepon :	Email :
Facebook :	Twitter :
Website :	Instagram :
8. Pendidikan Responden	
9. Jabatan Responden	
10. Status Kependudukan Responden	
Kode 1. Asli Kelahiran Bangka Belitung	
Kode 2. Pendatang	☐ Jika Kode 2, Tuliskan Asal.....

*) coret yang tidak sesuai

BLOK I I : KETERANGAN KATEGORI DAN PRODUK UNGGULAN	
(1)	(2)
1. Kategori/ Sektor	a. ProsuK Olahan Hasil Perikanan b. Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner c. Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk d. Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budaya
2. Produk Unggulan	a. Kretek b. Kempelang c. Kerupuk d. Kricu e. Otak-otak f. Martabak g. Tin Power h. Tin Pastel i. Kepiting Bakau
Tahun Berdiri	

BLOK III.A : DATA PRODUKSI (TON)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.B : HARGA (RUPIAH)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.C : KEUNTUNGAN (LABA BERSIH)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.D : JUMLAH UMKM (UNIT)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.E : TENAGA KERJA (ORANG)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.F : KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keunggulan Kompetitif	a. Provinsi b. Nasional c. Global (ekspor)
-----------------------	--

BLOK IV: TANTANGAN

Tantangan	
-----------	---

BLOK V : KETERANGAN PETUGAS

URAIAN	ENUMERATOR	VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)
1. Nama		
2. Tanggal Pelaksanaan		
3. Tanda tangan		



KAJIAN KERJASAMA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG DENGAN BAPPEDA KOTA PANGKALPINANG

Bapak/Ibu Responden yang kami hormati,

Kuesioner ini adalah bagian dari kajian ilmiah yang dilaksanakan atas kerjasama antara Universitas Bangka Belitung dengan BAPPEDA Kota Pangkalpinang. Kajian ini akan menggali informasi berkenaan dengan **Dokumen Pendahuluan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029**. Pengambilan data ini adalah bagian dari kajian yang bersifat ilmiah sehingga nama informan tidak akan disebutkan dalam laporan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dan secara umum dapat memperluas khasanah keilmuan.

Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).

BLOK I : KETERANGAN UMUM	
(1)	(2)
1. Provinsi	
2. Kabupaten/Kota *)	
3. Kecamatan	
4. Kelurahan/Desa *)	
5. Nama Responden	
6. Nomor Urut Responden	
7. Alamat:	
Jalan :	
No Telepon :	Email :
Facebook :	Twitter :
Website :	Instagram :
8. Pendidikan Responden	
9. Pekerjaan Responden	
10. Jabatan Responden	
11. Status Kependudukan Responden	
Kode 1. Asli Kelahiran Bangka Belitung	☐
Kode 2. Pendatang	
Jika Kode 2, Tuliskan Asal.....	

*) coret yang tidak sesuai

BLOK I I : KETERANGAN KATEGORI DAN PRODUK UNGGULAN	
(1)	(2)
1. Kategori/ Sektor	a. Wisata Budaya Berbasis Potensi Lokal
2. Produk Unggulan	a. Rangkaian Wisata Kuliner Khas daerah b. Wisata Sejarah dan Kalender Event Budaya c. Batik

BLOK III.A : JUMLAH KUNJUNGAN (ORANG)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.B : PENDAPATAN TIKET MASUK (RUPIAH) (BAGI WISATA)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.C : PENDAPATAN (BAGI KULINER DAN BATIK)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.D : JUMLAH UMKM (UNIT)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.E : TENAGA KERJA (ORANG)

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023

BLOK III.F : KEUNGGULAN KOMPETITIF

Keunggulan Kompetitif	a. Provinsi b. Nasional c. Global (ekspor)
-----------------------	--

BLOK IV : KEUNGGULAN KOMPETITIF

Tantangan	

BLOK V : KETERANGAN PETUGAS

BLOK V : KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	ENUMERATOR	VERIFIKATOR
(1)	(2)	(3)
1. Nama		
2. Tanggal Pelaksanaan		
3. Tanda tangan		

BERITA ACARA
FGD AKHIR KAJIAN PENDAHULUAN RENCANA INDUK PETA JALAN
PEMAJUAN IPTEK DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
Nomor :000.9.7/BA/BAPPERIDA/XI/2024

Pada hari ini, *Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-11-2024)*, bertempat di Ruang Rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Jl. Basuki Rahmat Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* Akhir Kajian Pendahuluan Rencana Induk Peta jalan Pemajuan IPTEK Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, disepakati beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset Inovasi Daerah.
 - a. Penyusunan rencana induk dan peta jalan inovasi daerah.
 - b. Pengembangan data iptek berbasis digitalisasi dan satu data.
 - c. Pembangunan pusat-pusat riset dan inovasi daerah.
 - d. Mengoptimalkan tata kelola destinasi wisata unggulan, dengan pemberdayaan riset, inovasi dan pokdarwis.
 - e. Peningkatan anggaran riset yang tidak hanya berfokus pada sumber APBD, namun juga dengan sumber pendanaan lain seperti hibah yang di adakan oleh beberapa kementerian, badan, lembaga nasional dan lembaga internasional.
 - f. Penyediaan anggaran insentif bagi peneliti dan inovator daerah.
 - g. Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual Produk Unggulan Daerah.
2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi.
 - a. Penguatan kerjasama dan kualitas riset dan inovasi daerah dengan perguruan tinggi dan badan usaha yang terdapat di daerah dalam mengembangkan IPTEK berbasis permasalahan yang terdapat didaerah, sebagai solusi pengembangan pembangunan daerah.
 - b. Membangun Pusat Riset dan Inovasi Daerah
3. Strategi Peningkatan Kemintraan Riset dan Inovasi Daerah
 - a. Kerjasama riset dengan mitra

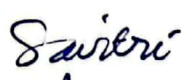
- b. Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi daerah serta adanya proses evaluasi implementasi riset
 - c. Membuka peluang kerjasama dengan swasta, pelaku usaha dan masyarakat sehingga tercipta sinergitas.
 - d. Mendirikan pusat riset (dalam hal ini disebut pada poin 2b), inkubator bisnis, ruang kreatif publik, dan technopark.
 - e. Melakukan publikasi terbuka hasil riset dan inovasi daerah.
 - f. Membentuk kelembagaan pusat inovasi daerah.
4. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah.
- a. Perluasan Promosi Riset dan Inovasi Daerah melalui Digitalisasi.
 - b. Peningkatan apresiasi hasil riset dan inovasi daerah serta membuka peluang dan kesempatan bagi tenaga kerja untuk ikut aktif dalam riset dan inovasi.
 - c. Pengembangan Usaha Berbadan Hukum melalui pelatihan pelaku usaha PUD.
 - d. Melakukan Inventarisasi data secara berkala dan konsisten.
 - e. Perlu adanya rencana kolaborasi dengan BRIN, pelaku usaha, dan perguruan tinggi terkait.
 - f. Memperbanyak Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Paten dari data data hasil riset dan inovasi daerah terutama PUD.
5. Strategi Peningkatan Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah.
- a. Menyelaraskan pengembangan riset dan inovasi IPTEK dengan RPJMD & RPJPD.
 - b. Pemetaan Produk Unggulan Daerah.
 - c. Penyelarasan tema riset antara pusat, provinsi dengan daerah.
6. Strategi Penyeragaman Penyeragaman dengan Perkembangan Global.
- a. Menyusun klaster riset dan inovasi daerah yang memiliki dasar hukum.
 - b. Melakukan Penguatan Kerjasama dan peningkatan kualitas riset nasional internasional.
 - c. Penguatan Kerjasama Internasional.
7. Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
- a. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset Daerah.
 - b. Pengembangan Pusat Riset Daerah.
 - c. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM/Fungsional Peneliti.

- d. Penguatan Kerjasama pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi.
- e. Pengembangan PUD Berbasis Riset.
- f. Peraturan Daerah untuk penerapan RIPJPID terhadap Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah dalam mendukung PUD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA FGD AKHIR
KAJIAN PENDAHULUAN RENCAN INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUNAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Yan Rizana, S.T., M.Si.	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
2	Nurwasya, S. Si., M.S.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
3	Erika Handoko, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
4	Riharnadi, S.E.	Kepala Bidang Destinasi dan Pengembangan Pariwisata	Dinas Pariwisata	
5	Susi Erawati, S.E., M.M.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	
6	Lindha, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
7	Erni Rindasari, S.STP.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
8	A Futhra Prawira Negara, S.Pi.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	

9	Yerri Amarta, S.Pi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	
10	Shanty Agustina, S.H.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Ester J. Lubis, S.KM.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limba B3 dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Nur Ikhsan, S.IP.	Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan	BPBD	
13	Yurindra, S.T., M.T.	Wakil Rektor III	Institut Bisnis dan Sains ATMA LUHUR	
14	Dr. Iskandar Zulkarnain, S.IP., M.A.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Universitas Bangka Belitung	
15	Verry Andre Fabiani, S.Si., M.Si.	Fakultas Sains Teknik	Universitas Bangka Belitung	
16	Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.	Fakultas Hukum	Universitas Bangka Belitung	
17	Dr.Ir. Ismed Inonu, M,Si	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	Universitas Bangka Belitung	
18	Aditya A Fauzi	Kaprodi RSK Fakultas Sains & Informatika.	Universitas Pertiba	
19	Rendita Dwikarto		Universitas Anak Bangsa	
20	Dewi Savitri, S.St., M.Si	Narasumber	Badan Pusat Statistik Pangkalpinang	
21	Dr. Devi Valeriani, S.E, M.Si.	Narasumber	Universitas Bangka Belitung	
22	Ayu Wulandari, S.E., M.Si.	Narasumber	Universitas Bangka Belitung	

BERITA ACARA
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN (PUD) KOTA PANGKALPINANG
Nomor : 005.01 /BA/BAPPERIDA/VII/2024

Pada hari ini, *Senin Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat*, bertempat di Ruang Rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Jl. Basuki Rahmat Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan diskusi tentang penentuan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Pangkalpinang.

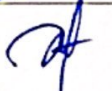
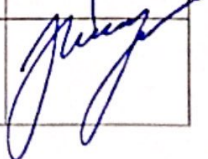
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, disepakati bahwa dasar berbagai kriteria, termasuk kriteria yang tercantum di dalam Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka Produk Unggulan Daerah Kota Pangkalpinang untuk lima (5) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

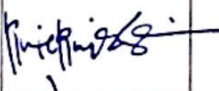
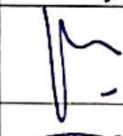
1. Produk Olahan Ikan
2. Desa Wisata Berbasis Ekowisata dan Budidaya
3. Wisata Budaya Berbasis Kekhasan Lokal
4. Ekonomi Kreatif Berbasis Kuliner
5. Hilirisasi Timah dengan Pengembangan Produk (Tin Powder, Tin Pastel)

Penentuan Produk Unggulan Daerah ini disepakati dalam memperhatikan data dan fakta yang disampaikan peserta diskusi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA FGD PENENTUAN PRODUK
UNGGULAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Yan Rizana, S.T., M.Si.	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
2	Andika Saputra, S.H, M.H.	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
3	Nurwasya, S. Si., M.S.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	

4	Erika Handoko, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
5	Yiyi Zilaida Diwitri, S.P.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	
6	Zunaria	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Pangan Pertanian	
7	Erni Rindasari	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
8	Yerri Amarta	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	
9	Shanty Agustina	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
10	Ester J. Lubis	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limba B3 dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si.	Narasumber	Universitas Bangka Belitung	
12	Ayu Wulandari, S.E., M.Si.	Narasumber	Universitas Bangka Belitung	
13	Dimas Januar Rizki, S.T., MS.Ak.	Narasumber	Badan Riset dan Inovasi Nasional	



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PANGKAL PINANG**

Jl. Yos Sudarso No. 94 Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Homepage: <https://pangkalpinangkota.bps.go.id> E-mail: bps1971@bps.go.id



Nomor : B-278/19716/IF.120/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik
Sektoral

Pangkal Pinang, 26 Juli 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kota
Pangkal Pinang

di-

Pangkal Pinang

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Survei Pendahuluan Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan IPTEK Daerah Kota Pangkalpinang
Penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kota
Pangkal Pinang

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : LAYAK
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik
terlampir.

Identitas Rekomendasi : V-24.1971.002
Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar
kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pangkal Pinang,



Dewi Savitri, S.S.T., M.Si.



Lampiran Surat Nomor : B-278/19716/IF.120/2024

Tanggal : 26 juli 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul : Survei Pendahuluan Rencana Induk dan Peta Jalan
: Pemajuan IPTEK Daerah Kota Pangkalpinang

Penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
: Kota Pangkal Pinang

Resume : <https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-24.1971.002>

Rekomendasi :

1. *Kuesioner Perlu diberikan kata "Rahasia"*
2. *Judul Survei harus sama dengan di Kuesioner*
3. *Konsep definisi variabel sebaiknya disesuaikan dengan standar yang ada.*
4. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model(GSBPM)* yang berlaku secara internasional.
 - a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
 - b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.
5. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.
 - a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
 - b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
6. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.

